

LAPORAN HASIL PENELITIAN

RESPONS
MASYARAKAT KAMPUS
TERHADAP NIKAH SIRI

Peneliti :

Prof. Dr. Katimin, M.Ag.
Prof. Dr. Syukur Kholil, MA
Dr. Sulidar, M.Ag
Dra. Asnil Aida Ritonga, MA

KEMENTERIAN AGAMA
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA
JAKARTA
Kerjasama Dengan
PASCASARJANA IAIN-SU MEDAN
Oktober 2010

LAPORAN HASIL PENELITIAN

RESPONS
MASYARAKAT KAMPUS
TERHADAP NIKAH SIRI

Peneliti :

Prof. Dr. Katimin, M.Ag.
Prof. Dr. Syukur Kholil, MA
Dr. Sulidar, M.Ag
Dra. Asnil Aida Ritonga, MA

KEMENTERIAN AGAMA
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA
JAKARTA
Kerjasama Dengan
PASCASARJANA IAIN-SU MEDAN
Oktober 2010

ABSTRAK

Respons Masyarakat Kampusterhadap Nikah Siri

Peneliti :

Prof.Dr.Katimin, M.Ag, Prof.Dr.Syukur Kholil, MA
Dr.Sulidar, M.Ag dan Dra. Asnil Aida Ritonga, MA

Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan masyarakat kampus terhadap nikah siri; untuk mengetahui sikap masyarakat kampus terhadap pernikahan siri; untuk mengetahui perilaku masyarakat kampus terhadap nikah siri. Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat penelitian ini dilakukan, berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Pengetahuan masyarakat kampus di kota Medan tentang nikah siri pada umumnya menyatakan bahwa nikah siri itu adalah nikah secara diam-diam tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama di tempat di mana nikah siri itu dilaksanakan. Namun, nikah tersebut memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan secara agama Islam.

Sikap masyarakat kampus di kota Medan tentang nikah siri terbagi dua, pertama menganggap positif, dalam arti kata tidak memperlmasalahkannya karena syah menurut agama Islam, hanya saja tidak tercatat dalam administrasi negara, *kedua*, mereka yang memandang negatif, dalam arti kata, pandangan mereka terhadap nikah siri itu lebih banyak membawa mudarat ketimbang maslahatnya, terutama banyak merugikan kaum perempuan serta anak yang dilahirkan melalui nikah siri, mereka tidak memiliki hak menuntut manakala terjadi perceraian, sebab mereka tidak tercatat dalam administrasi negara, sehingga mereka dianggap tidak pernah menikah.

Perilaku masyarakat kampus tentang nikah siri, pada umumnya tidak tenang, sebab terus dibayang-bayangi oleh istri pertamanya. Takut, kalau suatu waktu diketahui oleh istrinya, sehingga akan terjadi masalah seperti; disharmoni dalam rumah tangga.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penelitian ini berjudul : *Respons Masyarakat Kampus terhadap Nikah Siri*. Penelitian ini menjadi berdaya guna, karena mendapat bantuan dana dari Badan Penelitian dan Pengembangan Agama RI Jakarta dan motivasi keilmuan dari pelbagai pihak, maka selayaknya peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Agama RI Jakarta dan semua kalangan yang tidak dapat disebutkan namanya di sini yang telah berjasa memberikan kontribusinya kepada peneliti, semoga semua jerih payah dan jasa-jasa semua pihak mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah swt .

Dengan iringan doa kepada Allah swt, semoga sumbangan dan bantuan yang telah diberikan, akan mendapat kebaikan yang berlipat ganda dari Allah swt.

Dalam laporan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, baik materi maupun tata letaknya. Untuk itu maka peneliti mengharapkan masukan yang konstruktif dari pihak manapun, demi kesempurnaannya. Semoga kontribusi yang kecil ini bermanfaat baik kepada peneliti maupun pembaca. Amin.

Medan, 20 September 2010
Peneliti,

Prof.Dr.Katimin, M.Ag.
Prof.Dr.Syukur Kholil, MA
Dr. Sulidar, M.Ag
Dra. Asnil Aida Ritonga, MA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstrak	ii
Daftar Isi	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Kegunaan Penelitian	17
E. Batasan Istilah	18
F. Sistematika Laporan Hasil Penelitian	20

BAB II KERANGKA TEORETIS

A. Ulasan Umum tentang Nikah	22
B. Nikah Siri Dalam Perspektif Fikih	23
C. Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Positif	25
D. Penelitian Terdahulu yang Relevan	26
E. Kerangka Pemikiran	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
B. Sifat dan Pendekatan Penelitian	34
C. Informan Penelitian	35
D. Alat Pengumpul Data	36
E. Teknik Analisis Data	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Temuan Umum Penelitian	41
1. Ulasan Umum tentang Kota Medan	41

2. Profil Perguruan Tinggi Negeri Kota Medan	66
3. Visi, Misi, Perguruan Tinggi Negeri Kota Medan	70
4. Profil Informan Penelitian	73
B. Pengetahuan Masyarakat Kampus tentang Nikah Siri	75
C. Sikap Masyarakat Kampus tentang Pelaku Nikah Siri	84
D. Perilaku Masyarakat Kampus tentang Nikah Siri	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran-saran dan Rekomendasi	100
Bibliografi	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat kampus merupakan salah satu representatif dari masyarakat ilmiah. Oleh karena itu, idealnya masyarakat kampus dalam bersikap dan berpandangan sesuai dengan nilai-nilai ilmiah yang telah menjadi tradisinya. Kendatipun tidak selamanya harapan itu dapat terwujud sesuai dengan visi dan misi dari lembaga kampus di mana masyarakat kampus itu berada. Tetapi setidaknya mereka telah bergelut dengan nilai-nilai ilmiah dalam kesehariannya.

Berdasarkan itu, manakala masyarakat kampus diminta pandangan ataupun respons terhadap problema masyarakat tentunya mereka akan dipengaruhi oleh lingkungan, baik internal maupun eksternal di mana masyarakat kampus itu berada.

Salah satu problema yang berkembang di masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam adalah berkenaan dengan nikah siri. Bila menelaah hukum Islam suatu perkawinan dikatakan sah jika terlaksananya akad nikah yang memenuhi

syarat-syarat dan rukunnya.¹ Selanjutnya, dalam fikih klasik dan modern, mayoritas ulama memandang bahwa rukun perkawinan itu ada lima macam termasuk di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).²

Pernikahan, menurut pandangan fikih klasik dan fikih modern terdapat perbedaan yang senantiasa mendasar dan bahkan sudah menjadi pembicaraan yang panjang sehingga melahirkan hukum sesuai dengan dallil dan interpretasi masing-masing. Persoalan ini tampak ketika memandang perkawinan sebagai lembaga sosial³ yang mengalami dinamika dan derasnya

¹ Syarat, secara istilah adalah suatu sifat yang keberadaannya sangat menentukan keberadaan hukum syar'i dan ketiadaan sifat itu membawa kepada ketiadaan hukum atau tak eksis suatu hukum syar'i tanpa adanya syarat. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ikhtiar Van Hoeve, 1999), h. 1691. Dalam istilah perkawinan, syarat disebut sesuatu yang mesti ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat perkawinan itu.. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali*, (Bandung : Hidakarya Agung, 1983), h. 15. Rukun, secara istilah adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu.. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1511.

² Rukun nikah tersebut adalah : (1) suami, (2) calon istri, (3), wali nikah, (4) dua orang saksi, (5) ijab dan qabul. Lihat dalam Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fath al-Muin*, terjemahan, Ali As'ad (Surabaya ; menara Kudus, 1979), h. 13, lihat juga Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarif al-Nawawi al-Dimasqi, *Raudah al-Talidin* (Beirut-Lebanon: dar al-kitab al-'ilmiah, t.t.), h. 397-382. *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Humaniora Press, 1991), h. 21.

³ Istilah lembaga sosial (*social institution*) di Indonesia sering disinonimkan dengan pranata sosial karena adanya unsur-unsur yang dalam pandangan ahli sosial disebut dengan bangunan sosial seperti terjemahan dari *soziale gebilde* dalam bahasa Jerman. Sebagai lembaga sosial perkawinan tidak lagi hanya dipandang sebagai urusan pribadi semata (*private affair*) tetapi sudah merembes pada sosial yang lain terutama kepada pemerintah.

perubahan masyarakat yang tentunya memerlukan intervensi⁴ pemerintah di dalamnya.

Salah satu persoalan yang memerlukan intervensi pemerintah adalah terkait dengan lembaga pernikahan, yang secara khusus tentang pencatatannya. Fikih klasik menegaskan bahwa syarat perkawinan adalah segala syarat bagi atau syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan. Dalam fikih kontemporer khususnya berkenaan dengan hukum perkawinan yang ada di Indonesia berupaya untuk mengikuti modernitas sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan umat, sehingga dapat menutupi kekurangan dan celah-celah yang dapat merugikan pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut.

Menurut Muhammad Daud Ali syarat nikah jika disederhanakan ada empat macam. *Pertama*, persetujuan kedua mempelai, *kedua*, mahar atau sering disebut dengan mas kawin, *ketiga*, tidak boleh melanggar larangan-larangan perkawinan,

Lihat Muhammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1995), h. 2.

⁴ Kata intervensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *intervention* yang berarti campur tangan. Lihat Jhon M.Echol, *Kamus Inggris—Indonesia* (Jakarta : PT Gramedia, 1989), h. 328. Mengenai intervensi negara terhadap masyarakat adalah sangat memungkinkan dan boleh dengan alasan untuk menjamin hak-hak individu secara sempurna. Karena realitas dalam kehidupan masyarakat ada saja konflik dan pelanggaran-pelanggaran dan ketidakadilan termasuk di dalamnya individu maupun kelompok tertentu,, yang mempunyai nuansa bagi keutuhan dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Lihat M.Arskal Salim, GP, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibn Taimiyah* (Jakarta : Logos, 1998), h. 119-120.

dan keempat adalah setiap perkawinan harus dicatatkan atau syarat pencatatan.⁵

Permasalahan pencatatan sebagai syarat sah sebuah perkawinan di Indonesia menjadi sebuah produk hukum yang sangat krusial dalam kajian perkawinan konseptual maupun operasional. Ada yang mengatakan bahwa pencatatan sebagai syarat sah perkawinan karena sesuai dengan hukum Islam baik Alquran maupun al-Hadis. Namun, di lain pihak tidak sedikit yang beranggapan bahwa pencatatan nikah tidak lebih dari pada sekedar fungsi tertib administrasi saja,⁶ sehingga banyak terjadi pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) yang kemudian pernikahan seperti ini populer dengan nikah siri.

Di Indonesia, nikah siri dipopulerkan oleh masyarakat dengan pelbagai istilah, antara lain dengan kawin bawah tangan,

⁵ Muhammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, h. 72-75.

⁶ Kenyataan ini masih sangat dirasakan terutama dengan munculnya sebuah pertanyaan besar bagaimanakah sebuah perkawinan sah secara yuridis. Sebagian menganggap bahwa apabila sudah dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan itu seperti pada pasal 2 ayat 1 perkawinan sudah sah, sedangkan pencatatannya hanya merupakan pencatatan penting, penuh faedah dan administratif. Lihat Hajairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan 1/1974*, h. 5 dan 63. Pada sisi lain tidak sedikit yang mengatakan pencatatan itu syarat sah, baik bagi Islam maupun yuridis, hal ini dikemukakan seperti A.Gani Abdullah, Moh. Daud Ali dalam *Mimbar Hukum Islam*, No. 28 tahun VII 1996, September-Oktober, h. 29..

kawin diam-diam, kawin rahasia, kawin lari, kawin *sirri* atau *nikah sirri*.⁷

Dalam fikih Islam, terminologi nikah siri tidak dikenal. Demikian pula di kalangan penghulu, Tuan kadi atau KUA. KUA hanya mengenal dua macam nikah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nasional, yaitu nikah tercatat dan tidak tercatat. Secara umum, KUA tidak menerima praktik nikah siri. Kalau pun ada, hanya sebatas konsultasi. Sebab Penghulu/Tuan Kadi di KUA dan Petugas Pegawai Pencatat Nikah (P3N) akan terkena sanksi hukuman penjara, apabila melegitimasi nikah siri. Dengan kata lain, KUA tidak akan bertanggung jawab apabila timbul akibat hukum yang akan merugikan pihak-pihak yang berkepentingan di belakang hari. Artinya, resiko harus ditanggung oleh individu-individu yang bersangkutan.

Sesuatu yang aneh, walaupun KUA tidak mentolerir model nikah siri, tetapi fenomena kawin siri timbul dan berkembang secara diam-diam pada sebagian masyarakat Islam Indonesia hingga kini. Bahkan menjadi model masa kini. Artinya, model nikah siri di Indonesia bukan hal baru, tetapi sebenarnya telah berkembang lama di tanah air.

⁷ Secara harfiah "*sirri*" artinya "rahasia". Jadi, nikah siri adalah pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak.

Dewasa ini, kesan nikah siri menjadi kurang baik, karena banyak disalahgunakan oleh para laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Sebab para istri yang dinikahi secara siri yang jika dikemudian hari terjadi persoalan dengan pernikahan yang dijalannya, lalu mereka akan memperjuangkan keadilan untuk memohon pembagian harta waris dari mantan suaminya, termasuk memperjuangkan nasib anak-anak mereka untuk memperoleh status sebagai anak yang sah. Ternyata upaya-upaya hukum itu gagal di Pengadilan, karena nikah siri tetap tidak memiliki kekuatan apapun di mata hukum.

Boleh jadi hukum nikah siri sah menurut agama, tetapi tetap tidak sah menurut hukum negara. Apapun istilahnya, nikah siri yang dilakukan dengan tata cara agama Islam, tetapi tidak didaftarkan dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah, perkawinan itu tetap tidak sah. Perkawinan itu dianggap sah kalau didaftarkan dan dicatat oleh instansi negara yang berwenang.⁸

Perkawinan siri dilakukan masyarakat Islam di Indonesia bukan hanya waktu melaksanakan perkawinan pertama kali, tetapi dapat juga dilakukan untuk perkawinan kedua kali dan seterusnya. Dari pelbagai kasus nikah siri terjadi di pelbagai

⁸ Syarnubi Som, *Nikah Sirri Merugikan Pihak Perempuan, Menguntungkan Laki-laki*, i.wordpree.com/?s=nikah+sirri, didownload tanggal 10 Juli 2010.

daerah, di antara banyak alasan mengapa perkawinan itu dilaksanakan diam-diam⁹ adalah sebagai berikut ;

1. Dari pada selingkuh berkepanjangan, lebih baik melakukan nikah siri untuk menghindari perbuatan zina.
2. Untuk menghemat biaya dan menghindari prosedur administratif yang dianggap berbelit-belit (seperti syarat-syarat administrasi dari RT, Lurah dan KUA, izin istri pertama, izin Pengadilan Agama, izin dari atasan jika PNS/anggota TNI/POLRI dan sebagainya).
3. Karena calon istri terlanjur hamil di luar nikah.
4. Untuk menghindari tuntutan hukum dari istrinya yang sah di belakang hari, karena perkawinan yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama tidak dapat dituntut secara hukum di pengadilan.
5. Untuk menghapus jejak, agar tidak diketahui oleh istri pertama, sekaligus untuk menghindari hukuman administratif yang akan dijatuhkan oleh atasan, bagi mereka yang PNS atau anggota TNI/POLRI yang melakukan perkawinan untuk yang kedua kalinya.

⁹ *Ibid.*

Di sisi lain sebagian masyarakat berpandangan bahwa nikah siri atau nikah di bawah tangan tidak sah. Sebagian lain mengatakan sah. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa, nikah siri sah dilakukan untuk membina rumah tangga. Dalam fatwa MUI itu dinyatakan bahwa: "Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah kalau telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika menimbulkan mudarat atau dampak negatif,"¹⁰

Menurut Ma'ruf Amin, nikah siri adalah pernikahan yang telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih atau hukum Islam, namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan seperti itu dipandang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan anak yang dilahirkannya terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah ataupun hak waris.¹¹

¹⁰Fatwa MUI :Nikah Siri Sah,[http://sijorimandiri.net/jl/index.php?option=com_download, tanggal 10 Juli 2010](http://sijorimandiri.net/jl/index.php?option=com_download&Itemid=1&id=10). Ketua Komisi Fatwa MUI Ma'ruf Amin dalam jumpa pers di kantor MUI, Langit Dasar Masjid Istiqlal, Jl. Veteran, Jakarta, Selasa (30/5/2006). Fatwa tersebut merupakan hasil keputusan Ijtima' Ulama se-Indonesia II, di Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur yang berlangsung 25-28 Mei 2006.

¹¹ *Ibid.* Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut seringkali menimbulkan sengketa. Sebab tuntutan akan sulit dipenuhi karena tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah. Namun demikian untuk menghindari kemudharatan, peserta ijtima' ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang.

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia khusus bagi umat Islam paling tidak dapat disebutkan beberapa undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perkawinan dan pencatatan itu sendiri seperti UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan PP No. 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaannya. Sedangkan yang berkaitan secara langsung dengan pencatatan nikah, talak dan rujuk seperti UU No. 22 tahun 1946, UU No. 32 tahun 1959 dan juga Kompilasi Hukum Islam (KKHI) Impres No. 1 Tahun 1991. Termasuk juga sejumlah Peraturan Menteri Agama. Dalam Undang-undang No tahun 1974 pasal 2 ayat (2) dijelaskan tentang keharusan pencatatan nikah sebagai berikut : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."¹² Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 ini dijelaskan dan dirumuskan secara organik oleh pasal 2 ayat (10) PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam UU no. 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk."¹³

Untuk lebih jelasnya pasal yang dimaksud dari UU No. 32 tersebut adalah pada pasal 1 ayat (2) UU No. 32 tahun 1946

¹² Kutipan pasal-pasal tersebut diambil dari pedoman PPPN, BKM Pusat Jakarta, 1992/1993, h. 226.

¹³ *Ibid.* h. 260.

tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk sebagai berikut : “yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.”¹⁴ Tata cara pencatatannya dilakukan menurut bunyi pasal 3,4,5,6,7,8,9 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan (PPUP) yang mengatur mengenai prosedur pembentukan kehendak nikah dan kelengkapan administrasinya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN).¹⁵ Kemudian di dalam pasal 10 ayat (3) PPUP didasarkan pada: ‘Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah dan dihadiri dua orang saksi.’¹⁶ Dalam hal ini, bagi setiap perkawinan yang dilakukan menurut ajaran agama Islam, maka perkawinan tersebut harus dilakukan di hadapan PPN. Di dalam pasal 11 ayat (1) dan (3) dinyatakan bahwa :

“Sesaat sudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 peraturan pemerintah ini, kedua mempelai menanda tangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pencatat nikah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan

¹⁴ *Ibid.* h. 212.

¹⁵ Pegawai pencatat nikah yang selanjutnya diisebbut PPN adalah pegawai negeri yang diangkat dalam jabatan tersebut berdasarkan UU No. 22 Tahun 1946 pada tiap KUA Kecamatan, *Pedoman*, h. 336.

¹⁶ *Ibid.* 298..

penandatanganan akta perkawinan telah tercatat secara resmi.”¹⁷

Jika dilihat dari segi hukum perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang di dalam pasal 5 dan 6 ternyata unsur sah dan unsur tata cara pencatatan diberlakukan secara kumulatif. Bahkan di dalam pasal 7 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan bagi orang yang menikah menurut hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN. Dengan demikian KHI sudah menyatakan bahwa unsur pencatatan menjadi syarat adanya nikah yang sah tadi.¹⁸

Apabila ketentuan-ketentuan dan prosedur di atas dapat dilakukan dan dilaksanakan maka perkawinan tersebut sudah sesuai dengan amanat UU perkawinan No. 1 tahun 1974 dan PP No. 99 tahun 1975, KHI dan beserta peraturan-peraturan lainnya.¹⁹ Sebaliknya bila perkawinan tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku maka perkawinan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ A.Gani Abdullah, *Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah tangan*, dalam *Mimbar Hukum* No. 23 Tahun VI 1995, h. 49.

¹⁹ Adapun perkawinan yang dimaksud UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 adalah perkawinan yang dilangsungkan di hadapan KUA oleh Petugas KUA yang berwenang serta perkawinan tersebut didaftarkan (dicatatkan) menurut tata cara perundang-undangan yang berlaku. Lihat Masjfuk Zuhdi, *Nikah Sirri, Nikah di Bawah tangan, dan Status Anaknya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, dalam *Mimbar Hukum Islam* no. 28 tahun VII 1996, h. 15.

tersebut dikatakan sebagai perkawinan liar dalam bentuk kawin kumpul kebo (*compasionate marriage*).²⁰

Selain itu, perkawinan yang tidak memenuhi syarat yuridis sering pula disebut dengan perkawinan di bawah tangan atau nikah siri. Kawin akal-akalan, kawin kontrak, istri simpanan, selir, gundik yang semuanya hanya mengutamakan kenikmatan sesaat dan banyak mengundang mudarat daripada hanya sekedar maslahat yang diperoleh dari perkawinan tersebut. Jadi, setiap perkawinan yang terselubung (rahasia) tidak direstui oleh agama dan tidak dibenarkan oleh Undang-undang Perkawinan Negara yang sah.²¹

Adapun ketentuan pidana dari perkawinan yang tidak dilaksanakan secara yuridis maka dapat dipidana baik oleh KUHP maupun pidana Islam. Peristiwa pidana pelanggaran adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan tidak baik atau dilarang. Umumnya jenis pidana semacam ini dihukum dengan hukuman pidana kurungan, denda atau hukuman

²⁰ Yahya Harahap, *Informasi Materi KHI: Mempesotifkan Abstraksi Hukum Islam*, dalam buku, KHI dan PA dalam *Sistem Hukum Nasional* (Jakarta : Logos, 1999), h. 53, istilah perkawinan liar pertama kali dipopulerkan oleh ketua umum MUI (alm) KH. Hasan Basri sebagai antisipasi terhadap "kawin liar" yang sangat marak di kalangan masyarakat terutama ditemukan di daerah Pulau Batam, di mana banyak sekali pribumi yang kawin dengan laki-laki asing, lihat Wannimag Hasbul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan* (Jakarta : Golden Terayon Press, 1994), h. 32.

²¹ *Ibid.* h. 23.

administratif. Sifat dari masing-masing jenis hukuman tersebut berbeda kualitasnya.²² Dalam hal pelanggaran terhadap perkawinan termasuk kategori pelanggaran sudah ada ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan untuk itu.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 sebagai UU pokok perkawinan sama sekalil tidak memuat dan mencantumkan ketentuan pidana atau sanksi, kecuali pelanggaran perkawinan campuran (pasal 661 UUPA), tetapi hanya dimuat di dalam PP No. 9 tahun 1975 secara otomatis statusnya masih di bawah dari UU tersebut di atas. Tampaknya pencatuman ketentuan pidana pelanggaran hanya mengacu pada *Staadblad*. 1927 nomor 346 yang masih berlaku positif sampai sekarang.²³ Oleh karena itu,, ketentuan pidana dalam PP (*Pegerings Vevordering*) berdasarkan *staadblad* tersebut tidak pula menyalahi tata peraturan asal sanksinya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.²⁴

Jika diinventarisir pasal-pasal yang memuat ketentuan pidana dari pelanggaran hukum perkawinan, baik yang berasal dari UUP, PP, KUHP, PP NO. 10 dan Keputusan Menhankam pangab kep/10/1/1980 sebagai berikut :

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Irawan Soejitno, *Teknik Membuat Undang-undang*, (Jakarta : Pradinya Paramita, 1976), h. 90.

1. Pasal 61 ayat (20 dan 930 UUP No. 1 tahun 1974.
2. Pasal 45 PP No. 9 tahun 1975.
3. Pasal 279, 280 dan pasal 520 KUHP.
4. Pasal 16 dan pasal 17 PP no. 10 Tahun 1983 (dirubah menjadi pasal 15 dan 16 PP nomor 45 Tahun 1990).
5. Pasal 24 keputusan menghankam/Pangab Kep 01/1/1980.

Dari semua pasal tersebut jika dilihat dari sudut personal pelaku pelanggaran, maka dapat dilihat dari 4 pelaku. *Pertama* pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat, *kedua*, pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang melangsungkan perkawinan (masyarakat), *ketiga*, pelanggaran yang dilakukan oleh PNS dan yang dipersamakan dengannya, dan *keempat* adalah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI/Polri.²⁵

Dalam hukum Islam UU No. 1 tahun 1974 dan segala peraturan lainnya termasuk KHI adalah termasuk dari kategori *syasah syar'iyah*. Pengaturan ini dilakukan sejauh tidak melampaui batas dasar-dasar syariat universal Islam, kendatipun tidak sejalan dengan ijtihad para mujtahid sebelumnya, karena memang tidak diatur dalam Alquran dan al-Hadis maka sanksi pidana pelanggaran perkawinan disebut dengan hukum pidana *ta'zir*²⁶ di mana dalam hal ini dilakukan sepenuhnya oleh

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ta'zir* menurut istilah adalah hukuman yang diterapkan oleh imam/pemimpin atau wakilnya terhadap perbuatan maksiat yang tidak ada hukumnya dalam Alquran, seperti pemukulan, penamparan atau pidana tegoran. Syaikh Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malabari, h. 313. Lihat pula

pemerintah (*ulil amri*) sepeninggal Nabi Muhammad saw sebagai hasil dan pengalaman empiris praktek hukum pidana Islam.²⁷

Uraian di atas adalah gambaran tentang nikah siri, baik tinjauan secara yuridis maupun sekilas pandangan sebagian masyarakat. Jika menelaah masyarakat kampus, tentu akan berbeda pandangan, sikap dan perilakunya terhadap nikah siri yang telah dipraktikkan dalam masyarakat Islam Indonesia.

Penelitian ini akan menggali bagaimana respon masyarakat kampus berkenaan dengan nikah siri itu. Masyarakat kampus yang dikenal sebagai masyarakat yang berpendidikan, intelek serta berwawasan luas serta berpegang teguh dengan nilai-nilai ilmiah, akan berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Terutama masyarakat kampus yang tergolong dosen/staf pengajar dan mahasiswa. Mereka selalu bergelut dengan pelbagai teori-teori ilmiah sehingga perilaku dan pandangannya tentunya tidak jauh dari apa yang telah menjadi profesi dan minatnya itu. Namun, apakah memang pandangannya demikian adanya, untuk itulah diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana respon mereka terhadap nikah siri tersebut, yang memang sudah

Haliman, *Hukuman Pidana Syariat Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang , 1971), h. 458.

²⁷ Kurtubi Kosim, *Ketentuan Pidana Pelanggaran terhadap Hukum Perkawinan*, dalam *Mimbar Hukum Islam*, h. 30.

menjadi trend masyarakat Islam modern. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk diteliti.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan membuat judul penelitian ini, "*Respons Masyarakat Kampus terhadap Nikah Siri.*"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok penelitian yaitu, "Bagaimana respons masyarakat kampus terhadap nikah siri?"

Masalah pokok tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat kampus terhadap nikah siri.
2. Bagaimana sikap masyarakat kampus terhadap pernikahan siri.
3. Bagaimana perilaku masyarakat kampus terhadap nikah siri.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka secara umum penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan bagaimana

respons masyarakat kampus terhadap nikah siri. Tujuan umum penelitian tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat kampus terhadap nikah siri.
2. Untuk mengetahui sikap masyarakat kampus terhadap pernikahan siri.
3. Untuk mengetahui perilaku masyarakat kampus terhadap nikah siri.

D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana respons masyarakat kampus terhadap nikah siri. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi para pejabat terkait, khususnya di Kementerian Agama RI untuk menentukan kebijakan dalam masalah ini, serta bisa memberikan sosialisasi dan memberikan pemahaman tentang dampak yang akan ditimbulkan dari nikah siri tersebut.
2. Diharapkan bisa menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat yang ada di Kota Medan akan pentingnya pencatatan nikah.

3. Bagi peneliti sendiri manfaat yang bisa didapatkan tentunya akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, khususnya dapat memberikan pengenalan secara komprehensif tentang permasalahan yang terkait dengan nikah siri.
4. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian awal dan pedoman serta informasi aktual tentang penerapan hukum di dalam masyarakat terutama melihat efektif dan tidaknya. Selain itu diharapkan penelitian ini berguna bagi para pencinta ilmu sosiologi hukum, praktisi dan pegawai di lingkungan KUA khususnya.

E. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari pelbagai penafsiran mengenai maksud judul dan yang berkaitan dengannya, maka dipandang perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan.

1. Respons

Kata respons diartikan oleh *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tanggapan, reaksi, jawaban.²⁸ Maksud kata respons dalam penelitian ini adalah pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat kampus terhadap nikah siri.

²⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, 1988), h.746.

2. Masyarakat kampus

Kata masyarakat berasal dari terjemahan *society*, *community*, *people* dan *in habitants*.²⁹ Sedangkan dalam pengertian sosiologi, masyarakat adalah sebuah kelompok yang terorganisir secara besar atau banyak, memiliki pembagian tugas yang tetap, tinggal pada suatu daerah tertentu dan memiliki tujuan yang sama. Selain itu, masyarakat memiliki kesamaman identifikasi, teratur dan harmonis.³⁰ Jadi, masyarakat yang dimaksud adalah selain definisi di atas tetapi dikhususkan kepada masyarakat kampus. Sedangkan masyarakat kampus di sini dikhususkan pada masyarakat kampus di Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Negeri Medan (UNIMED), serta lebih dikhususkan lagi adalah para dosen dan mahasiswanya.

3. Nikah Siri

Istilah siri berasal dari bahasa Arab yaitu "*sirri*" yang berarti "rahasia".³¹ Jadi, nika siri adalah pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak. Di Indonesia nikah siri dipopulerkan oleh masyarakat dengan pelbagai istilah, antara

²⁹ S.Widiastuty, *Grand Kamus*, (Surabaya : Apollo, tt), h. 663.

³⁰ Blesaz Mavis Hutunem, *Introduction to Sociology*, (New York : T.Tp, 1978), h. 11, lihat juga, Alvin L.Bertrand, *Sosiologi*, terjemahan, SS.Faisal (Surabaya : Bina Ilmu, 1980), h. 2.

³¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, edisi kedua, (Surabaya : Pustaka Pogressif, 1997), h. 626.

lain dengan kawin bawah tangan, kawin diam-diam, kawin rahasia, kawin lari, kawin siri atau nikah siri.

Dalam buku-buku fikih Islam, terminologi nikah siri tidak dikenal. Begitu pula di kalangan penghulu/Tuan kadi atau Kantor Urusan Agama (KUA). KUA tidak mengenal istilah nikah siri. KUA hanya mengenal dua macam nikah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan nasional, yaitu nikah tercatat dan tidak tercatat.³² Jadi, nikah siri merupakan bagian dari nikah yang tidak tercatat dan disembunyikan dari masyarakat karena sebab tertentu, karena pernikahannya merupakan pernikahan poligami, ataupun karena sebab lainnya.

F. Sistematika Laporan Hasil Penelitian

Untuk memudahkan pembahasan secara sistematis dalam penelitian ini, maka peneliti membuatnya ke dalam beberapa bab bahasan, kemudian bab tersebut diuraikan lebih lanjut yang terdiri atas beberapa sub bab yang sistematis pembahasannya serta lebih terinci.

Bab pertama, pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

³² Syarnubi Som, *Nikah Sirri Merugikan Pihak Perempuan, Menguntungkan Laki-laki*, i.wordpress.com/?s=nikah+sirri, didownload tanggal 10 Juli 2010.

penelitian, batasan istilah, dan terakhir sistematika laporan hasil penelitian.

Bab kedua, kerangka teori yang terdiri atas ulasan umum tentang nikah, nikah siri dalam perspektif fikih, nikah siri dalam perspektif hukum positif, penelitian terdahulu, dan kerangka teori.

Bab ketiga, metode penelitian yang terdiri atas lokasi dan waktu penelitian, sifat dan pendekatan penelitian, informan penelitian, alat pengumpul data, dan terakhir teknik analisis data.

Bab keempat, hasil dan pembahasan penelitian yang terdiri atas temuan umum penelitian bahasan ini juga diuraikan lagi atas empat sub bahasan yaitu *pertama*, ulasan umum tentang kota Medan, profil perguruan tinggi negeri kota Medan, visi, misi, perguruan tinggi negeri kota Medan, profil informan penelitian. *Kedua*, pengetahuan masyarakat kampus tentang nikah siri, *ketiga*, sikap masyarakat kampus dan *keempat*, perilaku masyarakat kampus tentang nikah siri.

Bab kelima, penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran dan rekomendasi.

BAB II

KERANGKA TEORETIS

A. Ulasan Umum tentang Nikah

Kata nikah, pada dasarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu (نكح-ينكح-نكاح) artinya menikah atau mengawini.¹ Menurut istilah, nikah didefenisikan dengan banyak redaksi yang berbeda di kalangan fukaha. Namun definisi tersebut memiliki substansi yang sama, di antara definisi tersebut adalah :

عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته²

Sebuah akad yang di dalamnya mencakup kebolehan untuk melakukan hubungan suami istri yang diucapkan dengan lafal *al-inkah* atau *al-tazwiz* atau terjemahan dari keduanya.

Kendatipun memiliki redaksi yang berbeda, namun secara substansi bahwa nikah menurut terminologi fikih, memiliki definisi yang sama, yang mencakup adanya sebuah akad untuk bolehnya melakukan hubungan antara suami istri. Jika pada substansinya nikah itu adalah pendelegasian sebuah akad.

¹ Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2002), h. 1461.

² Muhammad al-Zuhri al-Ghamarawi, *al-Sirraj al-Wahhaj*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1991), h. 59.

B. Nikah Siri Dalam Perspektif Fikih

Nikahh siri dalam perspektif fikih dimaknakan sesuai dengan artinya secara etimologi, yaitu pernikahan yang dilaksanakan secara sengaja dengan cara diam-diam dan rahasia, tanpa diketahui oleh khalayak umum. Dalam terminologi nikah siri ini secara substansial dimaksudkan dalam pembahasan tentang persaksian nikah.

Ibn Rusyd menyebutkan lebih lanjut dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid*, bahwa Imam Abu Hanifah, Syafii dan Malik sepakat bahwa persaksian nikah itu merupakan syarat nikah. Mereka juga sepakat bahwa nikahh siri itu tidak boleh. Namun mereka, berbeda pendapat tentang apakah dapat dinamakan dengan nikah siri atau tidak jika ada kesepakatan dari 2 (dua) orang saksi nikah untuk menyembunyikan pernikahan tersebut. Imam Malik menyatakan bahwa nikah tersebut dinamakan dengan nikah siri yang kemudian menurutnya dapat *difasakh*. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Syafii berpendapat bahwa pernikahan tersebut bukanlah disebut sebagai nikah siri,³ sehingga term nikah siri ini lebih dikenal dan banyak disebutkan di kalangan ulama Malikiyah.

³ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II, (Jakarta : Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.), h. 15.

Dalam Muwatta' Imam Malik disebutkan :

موطأ مالك - (ج ٤ / ص ٥٧)

٩٨٢ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ هَذَا نِكَاحُ السَّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ.

Dan telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Zubair al-Makkiy bahwasannya Ibnu Umar bin al-Khattab didatangkan pada sebuah pernikahan yang tidak disaksikan kecuali oleh seorang laki-laki dan perempuan. Ia kemudian berkata: "Ini adalah nikah siri, dan saya tidak membolehkannya, seandainya aku bisa, niscaya akau akan merajamnya."⁴

Inti dari *walikh al-'urs* (وَلَيْمَةُ الْعُرْسِ) adalah informasi bagi

khalayak ramai tentang pernikahan mempelai. Ini dilakukan untuk menghindari syak wasangka pada masyarakat terhadap adanya perbuatan zinah. Dalam nikah siri seperti pada pengertian Malikiyah, para saksi menyembunyikan pernikahan menyebabkan esensi dari *walimah al-ursi* dan tujuannya tidak tercapai, karena itu mereka menolaknya.

Meskipun ulama Malikiyah memandang bahwa nikah siri sebagai pernikahan yang tidak sah, tetapi jika nikah siri dilakukan karena takut terhadap orang zalim, atau qadi (hakim,

⁴ Imam Malik, *Al-Muwatta'*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), h. 104.

undang-undang), maka dalam hal semacam ini, Malikiah pun memandang bahwa nikah siri tersebut boleh dilakukan.⁵

Menurut para ulama Hanabilah berpendapat bahwa akad yang disyaratkan dengan merahasiakan, baik yang dirahasiakan oleh wali maupun saksi, bahkan oleh kedua suami istri, tidak dapat membatalkan pernikahan, nikah siri seperti ini sah, namun hukumnya makruh. Bahkan menurut suatu riwayat, Khalifah Umar bin al-Khattab pernah mengancam pelaku nikah siri dengan hukuman *had*. Pendapat para ulama Hanbali ini juga diperpegangi oleh ulama dari kalangan Syi'ah Imamiyah.⁶

Selanjutnya menurut jumhur ulama fikih, yaitu di kalangan ulama Syafiiyah dan Hanfiah, bahwa pernikahan tersebut tidak batal, artinya bahwa nikah siri tidak bertentangan dengan hukum syara'.⁷

C. Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Positif

Nikah siri yang secara etimologi didefinisikan pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau

⁵ 'Ali al-'Adawi, *Hasyiyah al-Kurasy 'ala al-Mukhtasar Said Khalil*, Juz II, (Beirut : Dar Sadir, t.t.), h. 194. lihat juga dalam Muhammad 'Alisy al-'Adawi, *Minah al-Jallil 'ala al-Mukhtasar Said Khalil*, juz III, (Beirut : Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M) h. 301.

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz VII, (Beirut : Dar al-Fikr, 1998), h. 71.

⁷ Ibn Qudamah, *al-Mughni li Ibn al-Qudamahh*, juz IX (Riyad : Dar 'Alam al-Kutub, 1997), h. 469.

dirahaskan atau diam-diam. Dalam perspektif terminologi hukum positif di Indonesia sama sekali tidak dikenal.

Meskipun secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dipandang tidak sah di mata hukum.

Perkawinan sesungguhnya bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Agar terjamin ketertibannya, maka harus dicatat oleh PPN. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN.⁸

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang berkaitan dengan topik nikah siri ini ada beberapa tulisan yang berbentuk penelitian lapangan langsung, peneliti menemukan dua tulisan yang dilakukan oleh Ahmad Ubbe dengan judul penelitian “Beberapa Aspek Kesadaran Hukum Masyarakat Peusangan (Studi tentang Kelembagaan UU Perkawinan 1974)”, yang inti penelitian ini adalah ingin melihat sejauhmana masyarakat Peusangan Aceh melaksanakan UU

⁸ Wildan Suyuti Mustofa, “*Nikah Sirri (Antara Kenyataan dan Kepastian Hukum)*,” dalam *Mimbar Hukum*, vol. 28, h. 36.

No.1/1974 yang mana selama ini mereka lebih patuh kepada *keuchik* dan *imeum meunasah*. Dalam kesimpulan beliau bahwa UU belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Selanjutnya Atmaja dengan judul “Pengamatan terhadap Perkawinan Negerorod di Bali dengan Berlakunya UU Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974). Dalam penelitian ini ditemukan sebuah fakta sosial terhadap implementasi UU perkawinan tidak berjalan sebagaimana mestinya, khususnya dalam bidang pencatatan perkawinan. Masyarakat umat Hindu tidak pernah melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil melainkan dicatatkan oleh Desa atau Banjar-nya karena perkawinan *ngerorod* selalu kondisional dengan upacara *hyakala* di mana menurut kepercayaan umat Hindu Bali dilakukan dengan mencari waktu atau hari yang baik (*dewasa ayu*) untuk itu.

Selain itu ada dua penelitian dalam bentuk tesis, yaitu *pertama*, secara spesifik menyoroti tentang pencatatan pernikahan yang ditulis oleh Torang Rambe tahun 2002 dengan judul “Pandangan Masyarakat terhadap Pencatatan Nikah di Kecamatan Sigompulon Kabupaten Tapanuli Selatan.” Objek penelitian menyoroti tentang fenomena dan perilaku masyarakat yang tidak melakukan pencatatan nikah di Kecamatan Sigompulon. Dalam penelitiannya beliau melihat bahwa di

antara sekian banyak alasan kenapa masyarakat tidak mencatatkan nikahnya adalah faktor budaya kognitif, afektif dan psikomotorik dari hukum masyarakat yang sangat mengkhawatirkan. Banyak masyarakat Kecamatan Sigompulon menganggap pencatatan nikah kurang perlu. Selain itu alasan lainnya adalah didasarkan kepada pemahaman agama secara normatif di masyarakat yang menyatakan bahwa pernikahan tetap sah jika telah memenuhi syarat dan rukunnya walaupun tanpa dicatat di KUA.⁹

Selanjutnya tesis yang ditulis oleh Farhan Indra tahun 2009, dengan judul, “Problematika Nikah Siri di Masyarakat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.” Objek penelitian menyoroti tentang problematika nikah siri, perilaku masyarakat dan sanksi sosial terhadap pelaku nikah siri. Dalam penelitiannya beliau menemukan bahwa sanksi sosial terhadap mereka yang nikah siri adalah pengucilan dari masyarakat. Dalam bentuk kongkrit sanksinya adalah mereka secara administrasi.

Tidak akan mendapatkan pelayanan publik dari aparat desa, seperti pengurusan Kartu Keluarga, akte kelahiran anaknya, bantuan dari pihak Desa/Kelurahan, seperti Raskin

⁹ Torang rambe, *Pandangan Masyarakat terhadap Pencatatan Nnikah di Kecamatan Dolok Sihompulon Kabupaten Tapanuli Selatan*, (Tesis, PPS IAIN-SU, Medan, 2002), h. 27..

(Beras Miskin), mengurus Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat).

Berdasarkan penelitian di atas terlihat bahwa secara umum UU Perkawinan sudah diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, namun ada sebagian kecil masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya, di sisi lain adapula yang memang melakukan nikah siri, yang sengaja tidak mencatatkan pernikahannya. Penelitian ini memfokuskan pada satu aspek saja yaitu tentang respons masyarakat kampus terhadap nikah siri yang belum disinggung dalam penelitian yang telah dilakukan.

Urgensi penelitian ini berupaya untuk melihat bagaimana pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat kampus terhadap nikah siri. Lebih khusus lagi, masyarakat kampus yang ada di perguruan tinggi negeri kota Medan, yaitu Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Negeri Medan (UNIMED).

E. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam adalah hukum yang sangat demokratis, pluralis dan humanis dengan karakteristiknya seperti dia bersifat sempurna, elastis, universal, dinamis dan sistematis.¹⁰ Selain itu, hukum Islam juga memiliki prinsip yang sangat bersahaja,

¹⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos Waca Ilmu, 1997), h. 46-51.

dengan konsep menegakkan maslahat, menegakkan keadilan, tidak menyulitkan, menyedikitkan beban dan diturunkan atau diterapkan secara berangsur-angsur.¹¹ Adapun tujuannya yang sangat fundamental yang terkenal dengan istilah *maqasid al-syar'iyah* yaitu memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan.¹²

Urgensi penerapan hukum kelima unsur di atas dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu; *daruriyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyat*. Yang dimaksud dengan *daruriyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Adapun *hajjiyat* bukan termasuk kebutuhan esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Sedangkan *tahsiniyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan atau dengan arti lain sesuatu yang bersifat untuk memperindah atau berhias manusia.¹³

Dari pemikiran hukum Islam di atas terutama yang menyangkut tujuan pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasb*) dapat dipahami betapa urgennya pencatatan setiap peristiwa nikah,

¹¹ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta : Rosda Karya, 2000), h. 7-11.

¹² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 73.

¹³ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), h. 8.

sebab bila tidak akan mengancam eksistensi perkawinan tersebut (khususnya dalam pandangan negara) dan akan terjadi pengaburan terhadap status nasab anak-anaknya. Salah satu dampak positif perkawinan dicatakan adalah terjaminnya hak-hak kedua belah pihak dan diakuinya perkawinan tersebut dalam institusi negara.¹⁴

Namun, jika perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan maka perkawinan tersebut sangat rentan terhadap konflik yang setiap saat dihadapi pasangan tersebut. Kesewenang-wenangan talaq dari suami, istri tidak dapat menggugat suami, negara sangat sulit menyensus penduduknya, suami sangat bebas melakukan poligami yang kesemuanya ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan perkawinan tersebut. Maka, berdasarkan fakta dewasa ini, betapa banyaknya kasus pelanggaran dalam perkawinan bukan hal yang mustahil dan berlebihan, kalau pencatatan perkawinan sudah termasuk kategori unsur *daruriyat*, bukan hanya sekedar kebutuhan (*hajjiyat*) belaka dan unsur seni (*tahsiniyat*) saja.¹⁵

¹⁴ Dalam pandangan negara bahwa setiap perkawinan yang tidak dicatakan tidak diakui dan tidak mengakibatkan hukum, selama terjadi persengketaan maka penyelesaiannya sangat rumit dan sulit diselesaikan.

¹⁵ Pengingkaran perkawinan disebagian masyarakat adalah merupakan fakta yang sangat jelas betapa ikatan perkawinan tidak lagi hanya bertumpu pada dasar keimanan tetapi juga sudah harus berhubungan secara realitas dengan hal-hal yang berhubungan dengan unsur lain. Dalam sosiologi perubahan semacam ini disebut dengan perubahan sosial yaitu perubahan yang menyangkut nilai-nilai sosial, kaedah-kaedah sosial, pola prilaku,

Jelasnya, pemberlakuan hukum Islam di tengah masyarakat yang kental dengan adat adalah merupakan suatu hal yang sangat wajar. Tetapi manakala hukum Islam harus dipinggirkan dengan alasan dominasi adat adalah sangat kolonialis dan sama dengan menghapus hukum Islam tersebut secara perlahan-lahan. Namun demikian Islam juga sangat toleran dan adaptif dengan budaya lokal selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan ajaran fundamental Islam atau tauhid. Di sinilah letak ujian dan aplikasi hukum Islam sesuai dengan prinsip, karakter, tujuannya terus ditransformasikan sebagai sebuah kebutuhan dan aturan hidup manusia. Memang tidak dapat dielakkan bahwa hukum Islam sebagai wahyu juga tidak terlepas dari produk pemikiran manusia.

organisasi, lembaga kemasyarakatan, lapisan sosial, kekuasaan wewenang dan interaksi sosial, Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 87-88.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dua kampus negeri yang lokasinya ada di Kota Medan, yaitu Universi Sumatera Utara (USU) dan Universitas Negeri Medan (UNIMED), terutama warga ketiga kampus tersebut yang berkategori dosen dan mahasiswa. Inilah yang kemudian menjadi subjek dalam penelitian.

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pertimbangan bahwa untuk mendapatkan respons masyarakat kampus yang representatif adalah kampus yang memiliki akreditasi dan kualifikasi negeri. Sehingga sebagai pilihan kelayakan penelitian dalam rangka memperoleh informasi yang tepat mengenai objek penelitian ini. Selain itu, lokasi ini sengaja dipilih sebagai lokasi penelitian, karena peneliti adalah termasuk warga kota Medan, sehingga peneliti mengenal dan paham betul tentang keberadaan lokasi penelitian dan tentu saja akan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data dalam melaksanakan penelitian ini, di samping untuk efisiensi waktu maupun dana.

2. Waktu Penelitian

Adapun rentang waktu yang peneliti lalui dalam melaksanakan penelitian dimulai dari bulan Juli sampai Oktober 2010, sebagaimana yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 1

Waktu Penelitian

Uraian kegiatan	Bulan			
	Juli	Agustus	September	Oktober
Perencanaan dan persiapan penelian	x			
Penyusunan DO dan IPD	x			
Seminar DO dan IPD	x			
Pengumpulan data	x	xxx		
Pengolahan dan penulisan laporan			xx	
Seminar hasil			x	X
Penyusunan laporan final				Xxx
Penggandaan hasil				X

x = 1 minggu

B. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat penelitian ini dilakukan, berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana

adanya.¹ Untuk memberikan bobot yang lebih tinggi pada metode ini, maka data dan fakta yang ditemukan dianalisis dan disajikan secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

Dalam melakukan penelitian tentang respons masyarakat kampus di Kota Medan terhadap nikah siri, peneliti menggunakan pendekatan ilmu komunikasi. Pendekatan ilmu komunikasi dalam penelitian ini didominasi oleh pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang tidak dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus dan simbol-simbol statistik.² Seluruh rangkaian cara kerja atau proses penelitian kualitatif ini berlangsung secara simultan atau serempak, dilakukan dalam bentuk pengumpulan, pengolahan dan menginterpretasikan sejumlah data dan fakta yang ada, dan selanjutnya disimpulkan dengan metode induktif.³

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data mengenai respons masyarakat kampus di Kota Medan terhadap nikah siri, dibutuhkan informan penelitian. Informan penelitian yang dimaksud dalam penelitian

¹ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terpadu*, (Yogyakarta : Gajah Mada Universiti Press, 1996), h. 173.

² *Ibid.* h. 175.

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1999), h. 5.

ini adalah masyarakat kampus perguruan tinggi negeri yang khusus dipilih di Kota Medan, yaitu Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Negeri Medan (UNIMED). Masyarakat Kampus kedua perguruan tinggi negeri tersebut yang dimaksudkan sebagai informan penelitian ini lebih khusus yang berpredikat dosen, masing-masing perguruan tinggi dipilih 3 orang dan mahasiswanya juga tiga orang, sebagai informan kunci, dan minimal satu orang dari informan kunci mewakili dosen dan mahasiswa adalah yang melakukan nikah siri. Untuk memperkaya data, maka informan akan diperluas kepada dosen dan mahasiswa lainnya dari kedua perguruan tinggi tersebut sampai data jenuh.

Adapun spesifikasi dosennya adalah beragama Islam, berstatus pegawai negeri sipil dan telah masuk dalam kategori dosen sertifikasi. Demikian pula mahasiswanya beragama Islam dan telah mengikuti kuliah minimal dua tahun.

D. Alat Pengumpul Data

Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari informan penelitian, dengan melakukan **wawancara mendalam**. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka.

- *Wawancara*. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (*indept interview*). Informasi hasil

wawancara dicatat dalam catatan lapangan. Wawancara ini dilakukan secara berkelanjutan dan berulang-ulang. Pengulangan wawancara dilakukan guna melengkapi informasi dari konfirmasi. Artinya setiap ditemukan adanya informasi dari jawaban pertanyaan, dan kesimpulan-kesimpulan awal yang berkembang senantiasa dikonfirmasi ulang kepada informan. Ini dilakukan untuk memperoleh kepastian dan kevalidan data yang diperoleh atau dengan kata lain cara demikian merupakan bagian dari triangulasi yang memang disarankan dalam penelitian kualitatif.

- *Studi pustaka*, selain wawancara mendalam, peneliti juga mengumpulkan data yang bersumber dari literatur yang terkait dengan pernikahan secara umum serta kemudian dikorelasikan dengan literatur yang secara khusus membahas nikah siri.

E. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh, data tersebut diklasifikasikan sesuai keperluan agar lebih sistematis dan mudah untuk menginterpretasikannya. Untuk lebih mempertajam keabsahan data, data dianalisis dengan menggunakan **teknik triangulasi**. Menurut Moleong, analisis data ialah proses mengorganisasian

dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴

Analisa data adalah teknik yang digunakan untuk memaknai dan mendapatkan pemahaman dari ratusan atau bahkan ribuan halaman kalimat atau gambaran perilaku yang terdapat dalam catatan lapangan.⁵

Menurut Lexy J.Moleong⁶ proses analisis data adalah sebagai berikut :

- Menelaah seluruh data yang tersedia.
- Mengadakan reduksi data yanag dilakukan dengan jalan membuat abstraksi.⁷
- Menyusun data dalam satuan-satuan.
- Mengkategorisasi data.
- Membuat *koding*.
- Mengadakan pemeriksaan keabsahan data
- Penarikan kesimpulan.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 10.

⁵Robert C. Bogdan & Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research fo Education: An Introduction to Theory and Metdods*, (Boston : Allyn and Bacon, Inc, 1982), h. 80.

⁶ Lexy J.Moleong, *Metodologi, Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 190.

⁷Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang pelu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.

Analisis data di atas, dapat diringkas menjadi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Adapun untuk triangulasi dalam penelitian berarti membalas keterhandalan data yang diperoleh selama penelitian, baik cara memperoleh maupun hasil perolehannya. Moleong,⁸ membedakan empat macam triangulasi, yaitu (1) triangulasi penggunaan sumber,⁹ (2) triangulasi dengan metode,¹⁰ (3) triangulasi dengan penyidik,¹¹ dan (4) triangulasi dengan teori.¹²

⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 195.

⁹ **Triangulasi sumber** adalah membandingkan tingkat keakuratan informasi atau data yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, yaitu dengan cara: (1) membandingkan data yang diperoleh dari pengamatan dan hasil wawancara, (2) membandingkan data yang disampaikan seseorang di depan umum dengan data yang disampaikan secara pribadi, (3) membandingkan data yang diperoleh ketika penelitian dengan di luar penelitian, (4) membandingkan pelbagai pendapat dan pandangan dari orang-orang yang berbeda dalam pelbagai aspeknya, seperti tingkat pendidikan, status sosial-ekonomi, pekerjaan dan sebagainya, (5) membandingkan hasil wawancara dengan hasil studi dokumentasi.

¹⁰ **Triangulasi metode** yaitu pengecekan tingkat kepercayaan dan keabsahan data dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda atau pengecekan kepada beberapa sumber data dengan metode yang sama.

¹¹ **Triangulasi penyidik** adalah memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk mengecek kembali tingkat keabsahan data.

¹² **Triangulasi teori** adalah membandingkan pelbagai pandangan teori tentang suatu fenomena sehingga data dapat digali lebih dalam, akurat dan terpercaya.

Mengingat keterbatasan penelitian ini baik dari biaya, tenaga, dan waktu, maka peneliti hanya menggunakan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengumpulkan semua informasi yang diperoleh dari beberapa sumber data atau subyek penelitian. Sedangkan triangulasi dengan metode dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu strategi penelitian untuk memperoleh informasi yang sama.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Temuan Umum Penelitian

1. Ulasan Umum tentang Kota Medan

Peralihan abad 20 ke abad 21 tidak hanya sekedar perubahan angka saja, tetapi ia membawa pelbagai perkembangan baru bagi kehidupan umat manusia, baik ruang lingkup wilayah, daerah maupun global. Di era globalisasi ini, dunia semakin mengecil dan sempit, orang dengan sangat mudah mengakses pelbagai informasi dari pelbagai penjuru dunia hanya dalam hitungan menit. Hal yang sama, yang demikian itu tidak mungkin dapat dilakukan pada masa lalu. Dengan demikian, ilmu, teknologi, budaya dan agama sangat mudah tersebar di pelbagai kota di dunia, termasuk kota Medan, salah satu kota besar di Indonesia.

Kota Medan yang oleh wali kota, Drs. H. Abdillah, SE, Ak. MBA (periode 2005-2010), mencanangkan sebagai kota metropolis yang modern, madani dan religi (berkonsep keagamaan), telah mengikuti perubahan global yang cepat. Apabila perubahan global itu tidak disikapi dengan baik, maka

dapat dikatakan bahwa kota ini akan kehilangan identitas dan warganya pun akan jauh dari budaya yang menanamkan nilai-nilai luhur. Perkembangan kota Medan tidak terlepas dari sejarah, ekonomi dan kewujudan kota Medan itu sendiri, yaitu sebagai kota yang berfungsi secara luas dan besar, serta sebagai salah satu dari tiga kota metropolis terbesar di Indonesia.

Sebagaimana dimaklumi bahwa agama dalam kehidupan umat manusia merupakan hal yang mendasar dan prinsip, baik sebagai dasar keyakinan, sosiologi, maupun psikologi. Prinsip tersebut, seperti mempertahankan masyarakat untuk kelangsungan hidup mereka dengan maksimum. Meskipun kadang-kadang dalam memenuhi keperluan tersebut, terjadi pelbagai kontradiksi atau konflik.

Kota Medan yang merupakan kota nomor tiga terbesar di Indonesia, tentu memiliki ciri-ciri khas, terutama apabila dilihat dari perkembangan masyarakatnya yang beragam etnik, dan agama.

Geografi dan Demografi kota Medan

Kota Medan memiliki luas 26.510 hektar atau 3,6% dari wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota dan kabupaten (daerah) lainnya, kota Medan

memiliki luas wilayah yang relatif kecil, tetapi jumlah penduduknya relatif banyak. Secara geografi kota Medan terletak pada 3° 30' – 3° 43' lintang utara dan 98° 35' - 98° 44' bujur timur. Oleh karena itu, keberadaan kota Medan pada lintang utara berada pada ketinggian 2,5 - 37,5 meter di atas permukaan laut.¹

Secara administratif, wilayah kota Medan hampir secara keseluruhan berdampingan dengan kabupaten Deli Serdang, yaitu sebelah barat, selatan dan timur. Sepanjang wilayah utara bersempadan langsung dengan Selat Melaka, yang merupakan salah satu jalur lalu lintas terpadat di dunia. Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA), khasnya di bidang perkebunan dan kehutanan. Karenanya secara geografi kota Medan disokong oleh daerah-daerah yang kaya Sumber Daya Alamnya, seperti: Deli Serdang, Labuhan Batu, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Karo, Binjai dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan kota Medan secara ekonomi, mampu mewujudkan pelbagai kerjasama yang saling menguntungkan, serta mendorong daerah-daerah sekitarnya. Di samping itu sebagai daerah yang berada pada pinggir jalur pelayaran Selat Melaka, maka kota Medan memiliki posisi strategik sebagai gerbang (pintu masuk) kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik

¹ Lihat [www.http://pemukomedan.go.id](http://pemukomedan.go.id)

perdagangan domestik maupun luar negara (eksport-import). Posisi geografi kota Medan ini telah mendorong perkembangan, pertumbuhan dua daerah secara fisik, yaitu daerah pelabuhan Belawan dan pusat kota Medan saat ini.

Berdasarkan data penduduk tahun 2009, penduduk kota Medan saat ini diperkirakan telah mencapai 2, 067, 288 jiwa, dengan jumlah wanita (1, 039, 681 jiwa) lebih besar dari lelaki (1, 027, 607 jiwa). Jumlah penduduk tersebut diketahui merupakan penduduk daerah tersebut, sedangkan penduduk pendatang diperkirakan lebih dari 500.000 jiwa, yang merupakan penduduk pendatang. Dengan demikian kota Medan merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk yang besar, sehingga memiliki kepercayaan pasar.²

Keadaan penduduk atau demografi kota Medan cukup padat dan selalu mengalami gejala turun naik, dan sekaligus merupakan modal pembangunan bagi kota Medan. Program Pemerintah tentang kependudukan di Medan meliputi : 1) Pengendalian kelahiran, dan penurunan tingkat kematian bayi dan anak, 2) Usaha memperpanjang usia harapan hidup serta, 3) Penyebaran penduduk secara seimbang. Adapun jumlah penduduk kota Medan 2, 067, 288 jiwa dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Peningkatan penduduk kota Medan

² BPS. kota Medan tahun 2009.

dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat seperti tabel 1. dalam tabel tersebut kelihatan bahwa pertahun mengalami peningkatan sebanyak 1,2% pertahun. Dengan demikian, angka pertumbuhan penduduk boleh dikatakan penting kenaikannya. Untuk lebih terperinci perhatikan tabel berikut ini.

Dilihat dari struktur umur penduduk, kota Medan dihuni lebih kurang 1,377,751 jiwa berusia produktif, (15-59 tahun). Selanjutnya dilihat dari tingkat pendidikan, rata-rata masa sekolah penduduk telah mencapai 10,5 tahun. Dengan demikian kota Medan secara relatif tersedia tenaga kerja yang cukup, yang dapat bekerja pada pelbagai jenis perusahaan, baik jasa, perdagangan, maupun industri perkilangan, seperti kilang pembuatan alat-alat elektrik.

Pada perkembangan selanjutnya, melalui Peraturan Republik Indonesia No. 35 tahun 1992 tentang pembentukan beberapa kecamatan Sumatera Utara yang termasuk dua kecamatan pertambahan di kota Medan, sehingga dari 19 kecamatan lalu diperluas menjadi 21 kecamatan dan terdiri dari 144 kelurahan, untuk lebih rinci perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 1**Nama Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Medan³**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Ket.
01	Kecamatan Medan Tuntungan	9 Kelurahan	
02	Kecamatan Medan Johor	6 Kelurahan	
03	Kecamatan Medan Amplas	7 Kelurahan	
04	Kecamatan Medan Denai	6 Kelurahan	
05	Kecamatan Medan Tembung	7 Kelurahan	
06	Kecamatan Medan Kota	12 Kelurahan	
07	Kecamatan Medan Area	12 Kelurahan	
08	Kecamatan Medan Baru	6 Kelurahan	
09	Kecamatan Medan Polonia	5 Kelurahan	
10	Kecamatan Medan Maimun	6 Kelurahan	
11	Kecamatan Medan Selayang	5 Kelurahan	
12	Kecamatan Medan Sunggal	6 Kelurahan	
13	Kecamatan Medan Helvetia	7 Kelurahan	
14	Kecamatan Medan Petisah	7 Kelurahan	
15	Kecamatan Medan Barat	6 Kelurahan	
16	Kecamatan Medan Timur	9 Kelurahan	
17	Kecamatan Medan Deli	5 Kelurahan	
18	Kecamatan Medan Labuhan	4 Kelurahan	

³ Sumber : BPS Kota Medan 2009

19	Kecamatan Medan Belawan	6 Kelurahan	
20	Kecamatan Medan Marelan	4 Kelurahan	
21	Kecamatan Medan Perjuangan	9 Kelurahan	
	Jumlah : 21 Kecamatan	144 Kelurahan	

Perkembangan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara No. 140.22/2722.K/1996 tarikh 30 September 1996 tentang ketentuan instansi-instansi di kota-kota daerah tingkat II se Sumatera Utara, sehingga kelurahan di kota Medan menjadi 151 kelurahan belum ada perubahan hingga penelitian ini dilakukan. Untuk lebih rinci perhatikan tabel berikut ini.

Tabel 2
Nama Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Madya
Medan⁴

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Ket.
01	Kecamatan Medan Tuntungan	9 Kelurahan	
02	Kecamatan Medan Johor	6 Kelurahan	
03	Kecamatan Medan Amplas	7 Kelurahan	

⁴Sumber : BPS Kota Medan 2009

04	Kecamatan Medan Denai	6 Kelurahan	
05	Kecamatan Medan Tembung	7 Kelurahan	
06	Kecamatan Medan Kota	12 Kelurahan	
07	Kecamatan Medan Area	12 Kelurahan	
08	Kecamatan Medan Baru	6 Kelurahan	
09	Kecamatan Medan Polonia	5 Kelurahan	
10	Kecamatan Medan Maimun	6 Kelurahan	
11	Kecamatan Medan Selayang	5 Kelurahan	
12	Kecamatan Medan Sunggal	6 Kelurahan	
13	Kecamatan Medan Helvetia	7 Kelurahan	
14	Kecamatan Medan Petisah	7 Kelurahan	
15	Kecamatan Medan Barat	6 Kelurahan	
16	Kecamatan Medan Timur	11 Kelurahan	
17	Kecamatan Medan Deli	6 Kelurahan	
18	Kecamatan Medan Labuhan	6 Kelurahan	
19	Kecamatan Medan Belawan	6 Kelurahan	
20	Kecamatan Medan Marelan	5 Kelurahan	
21	Kecamatan Medan Perjuangan	9 Kelurahan	
	Jumlah : 21 Kecamatan	151 Kelurahan	

Dengan demikian wilayah kota Medan secara administrasi dibagi menjadi 21 kecamatan dan 151 kelurahan.

Berdasarkan hasil penelitian sejarah, maka ditetapkan tarikh 1 Julai 1590 sebagai hari jadi kota Medan. Hingga saat ini tarikh tersebut tidak mendapat bantahan dari pihak manapun dan dapat diterima oleh semua pihak sebagai Hari Jadi Kota Medan, ini ertinya pada 1 Julai 2008 telah berusia 418 tahun.

Adapun, orang-orang yang pernah sebagai Walikota Medan sejak pengistiharan Kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini ada 14 orang, lebih lanjut lihat tabel sebagai berikut⁵ :

Tabel 3

**NAMA-NAMA WALIKOTA MEDAN DAN PERIODE
JABATANNYA**

No	Nama Walikota	Periode Jabatan
01	Luat Siregar	24 -08-1945 s/d 10-11-1945
02	Mohammad Yusuf	10-11-1945 s/d Ogos 1947
03	Jaidin Purba	01-11-1947 s/d 12-07-1952

⁵Sumber : BPS Kota Medan 2005

04	A.M.Jalaluddin	12-07-1952 s/d 01-12-1954
05	H.Muda Siregar	06-12-1954 s/d 14-06-1958
06	Majda Purba	03-07-1961 s/d 28-02-1964
07	Basyrah Lubis	28-02-1964 s/d 30-10-1964
08	P.R.Talaumbanua	30-10-1965 s/d 28-08-1965
09	Aminurrasyid	28-08-1965 s/d 26-09-1966
10	Drs. Syurkani	26-09-1966 s/d 03-07-1974
11	A.M.Saleh Arifin	03-07-1974 s/d 31-03-1980
12	A.S.Rangkuty	01-04-1980 s/d 31-03-1990
13	Bachtiar Djafar	01-04-1990 s/d 18-04-2000
14	Drs.H.Abdillah, Ak, MBA	18 April 2000 s/d April 2005 Agustus 2005 s/d Agustus 2010
15	Drs.H.Rahudman Harahap, MAP	Agustus 2010-Agustus 2015

Jika ditelaah masa jabatan Walikota Medan nombor 12, 13 dan 14, masing-masing memegang jawatan selama 10 tahun, dan keadaan ini cukup memberikan sokongan keamanan dan kerukunan umat beragama di kota Medan. Berbeza dengan jabatan Walikota 1945 sampai tahun 1980 yang mana masa

memegang jabatannya tidak sampai 10 tahun sehingga berpengaruh kurang stabilnya kehidupan sosial.

Perkembangan Masyarakatnya

Sebagai pusat perdagangan baik kebangsaan maupun antarabangsa, sejak awal kota Medan memiliki keragaman etnik dan agama. Oleh karenanya, budaya masyarakat yang ada juga sangat beragam, yang tentunya sangat menguntungkan, sebab diyakini tidak satupun kebudayaan yang menolak kemajuan, dan sangat diyakini pula, hidup dan berkembangnya nilai-nilai budaya yang berlainan, dapat menjadi potensi besar dalam memperoleh kemajuan. Keragaman etnik, tarian daerah, alat musik, nyanyian, makanan, dan sebagainya, justeru memberikan sokongan besar bagi usaha pengembangan industri pelancongan di kota Medan.

Sesuai dengan semangat masyarakatnya, maka pembangunan kota Medan menjadi sangat berghairah, yang mana pembangunan dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan kerjasama. Dua semangat itu dapat dikatakan merupakan rancangan fondasi dari pembangunan kota Medan.⁶

⁶ Lihat [www.http://pekomedan.go.id](http://pekomedan.go.id). Khasnya pembangunan kota Medan.

Hanya sahaja, dalam perkembangannya, masalah yang muncul adalah keadaan kota yang tidak berghairah dan redup. Sebab keredupan kota karena kekurangan lampu penerang jalan/penerangan, sering menghilangkan semangat masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, pemerintah kota Medan berusaha dengan serius dan mendorong potensi Perusahaan Listrik Negara (PLN), untuk membangun penerangan kota.

Usaha tersebut ternyata mendapat sambutan baik dari seluruh masyarakat. Dan dengan bersinarnya kota ini ternyata dapat menimbulkan pelbagai keghairahan pembangunan dalam pelbagai sektor.

Sejalan dengan itu, bersamaan seluruh komponen masyarakat dipanggil untuk memberikan sumbangan mereka yang maksimal terhadap pelaksanaan pembangunan kota Medan. Karena itulah, moto pemerintah kota Medan pada masa Abdillah adalah “Bekerja sama dan sama-sama bekerja” untuk membangun kota Medan yang lebih makmur dan sejahtera.⁷

⁷ Lihat [www.http://pekomedan.go.id](http://pekomedan.go.id). Khasnya pembangunan kota Medan.

Kehidupan Sosial Budaya

Kondisi sosial yang terbagi atas pendidikan, kesihatan, kemiskinan, keamanan dan ketertiban, agama dan lainnya, merupakan faktor yang membantu bagi pertumbuhan ekonomi kota Medan. Kewujudan pendidikan, kesehatan, adalah penting bagi masyarakat untuk memperoleh hak pendidikan, kesehatan serta pelayanan sosial lainnya. Demikian juga halnya dengan kemiskinan, dimana merupakan salah satu masalah utama pengembangan kota yang mempengaruhi pelbagai faktor yang saling berhubungan, antara lain : tingkat pendapatan masyarakat, kesihatan, pendidikan, dan kondisi lingkungan. Kemiskinan bukan hanya difahami sebagai ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memperoleh hak-hak dasar dan perbezaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.⁸

Data SUSENAS tahun 2006, memperkirakan penduduk miskin di kota Medan tahun 2006 berjumlah 7.13% atau 32,804 rumah tangga atau 143,037 jiwa. Dilihat dari penyebarannya, Medan bahagian Utara (Medan Deli, Medan Labuhan, Medan

⁸ Lihat [www.http://pekomedan.go.id](http://pekomedan.go.id). Khasnya berkaitan dengan sosial budaya kota Medan.

Marelan dan Medan Belawan) merupakan wilayah miskin terbesar (37,19%) dari keseluruhan penduduk miskin.⁹

Kota Medan yang warganya terdiri atas multi etnik dan pelbagai agama, membuat kehidupan masyarakatnya begitu dinamik. Walaupun berdasarkan fakta warga kota Medan terdiri dari beragam etnik dan agama, namun belum pernah terjadi konflik yang hebat dengan alasan suku dan agama. Ini membuktikan bahwa warga kota Medan faham dalam bergaul sesama warga yang majmuk, di samping itu tingkat pendidikan yang terus meningkat memberikan sokongan terhadap lingkungan yang aman.¹⁰

Adanya masyarakat yang majmuk ini juga merupakan penghalang untuk munculnya isu-isu paling dasar/lama yang dapat mengganggu kehidupan sosial. Oleh karenanya, tujuan, strategi pembangunan kota Medan diwujudkan dalam bentuk kebudayaan yang mesti dipelihara secara harmoni.

Kehidupan yang harmoni tersebut, menjadikan sosial budaya warga kota Medan berjalan secara alamiah dan aman. Hal ini dapat dilihat bahwa di kota Medan banyak pertubuhan, perkumpulan, atau organisasi keagamaan dan suku. Seperti

⁹ Lihat [www.http://pekomedan.go.id](http://pekomedan.go.id). Khasnya pembangunan kota Medan.

¹⁰ *Ibid.*

perhimpunan dari etnik Mandailing, Batak, Karo, Padang, Aceh dan Jawa.

Kehidupan Ekonomi dan Politik

Kehidupan ekonomi dan politik warga kota Medan juga memiliki dinamika yang khusus. Hal ini karena mereka memiliki pelbagai potensi dalam perdagangan mereka. Selain itu, pemerintah kota telah berusaha untuk menarik pelabor dari luar negara untuk menanam sahamnya di kota ini. Di antara pelabor yang telah melakukan kerjasama di kota Medan, di antaranya, dalam bidang perhotelan, kondominium industri elektronik, bahan-bahan bangunan, pengolahan limbah, elektrik, air minum, dan lain-lainnya.¹¹

Kota Medan memiliki fungsi yang luas, samada sebagai pusat pemerintahan maupun kegiatan ekonomi dan sosial yang bukan hanya Provinsi Sumatera Utara sahaja, tetapi juga wilayah provinsi Sumatera Bahagian Utara (Sumbagut). Adanya fungsi yang luas tersebut, ternyata telah menjadikan kota Medan dapat mengamalkan aktiviti ekonomi dalam jumlah yang besar. Kapasiti ekonomi yang besar tersebut dibuktikan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang diperolehi kota Medan, yang sentiasa berada dipuncak pertumbuhan ekonomi daerah-daerah

¹¹ Lihat [www.http://pemukomedan.go.id](http://pemukomedan.go.id). Khasnya berkaitan dengan ekonomi dan politik.

sekitarnya, berbanding dengan penghasilan Provinsi Sumatera Utara maupun kebangsaan.

Walaupun kota Medan pernah mengalami pertumbuhan ekonomi negatif tahun 1998 (- 20%), namun selama tahun 2000 – 2008, ekonomi kota Medan dapat tumbuh kembali rata – rata sebesar 5,19%. Ini merupakan tanda bahwa bagaimanapun hebatnya, krisis ekonomi yang melanda ekonomi Indonesia dan kota Medan secara khas, tetapi secara beransur-ansur Indonesia dan kota Medan memiliki kemampuan untuk keluar dari krisis tersebut.¹²

Ekonomi yang relatif besar tersebut juga dibuktikan oleh nilai (wang) pendanaan kota Medan yang saat ini telah memperoleh Rp. 24,5 tri lion, dengan pendapatan perorang Rp. 12,5 juta, sektor *tertier* merupakan sektor sekunder (29,06%), dan sektor primer (4,18%). Jumlah volume kegiatan ekonomi ini, sekaligus memberikan bantuan lebih kurangnya sebesar 21% bagi pembentukan perencanaan pendanaan provinsi Sumatera Utara. Dilihat dari capaian pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan ekonomi kota Medan juga memperlihatkan keanjalan yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Ertinya, pertumbuhan ekonomi kota Medan sentiasa

¹² *Ibid.*

menunjukkan angka positif yang lebih besar dari pertumbuhan ekonomi provinsinya. Ini menunjukkan bahwa kota Medan masih merupakan mesin pembangunan bagi daerah – daerah lainnya di Sumatera Utara.¹³

Diberlakukannya Undang-Undang No : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang No : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas, fungsi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tersebut menyebabkan, masing- masing daerah mesti memiliki penghasilan yang cukup, daerah mesti memiliki sumber pembiayaan yang cukup untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian diharapkan masing-masing daerah akan dapat lebih berjaya dan sejahtera.

Untuk menyokong penyelenggaraan kewenangan, fungsi, dan tanggung jawabnya, pemerintah kota Medan memiliki pelbagai sumber pendapatan, iaitu : (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, (3) Pinjaman Daerah, (4) Lain-lain penerimaan yang sah. Sebagai daerah yang ekonominya sangat disokong oleh sektor sekunder dan tertier, sumber PAD

¹³ *Ibid.*

sebagian besar diperoleh dari cukai daerah. pemerintah kota Medan, yang mana cukai adalah sebagai cara memberikan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Walaupun ada peningkatan volume dalam PAD, tetapi diakui, 70% sumber penerimaan kota Medan di sektor awam masih berasal dari Pemerintah Pusat. Hal yang menggembirakan dalam hal pembiayaan pembangunan kota adalah, jika sebelumnya sebagian besar program pembangunan yang disediakan oleh pemerintah pusat disediakan dalam bentuk dana Inpres (regional) maupun dana DIP (sektoral), maka saat ini sebagian besar, sudah dalam bentuk bantuan spesifik (specific blok grant), dan blok grant yang langsung diterima dan dilaksanakan oleh daerah.¹⁵

Sebahagian besar dana perimbangan tersebut oleh pemerintah kota Medan, digunakan untuk pengembangan jaringan infrastruktur kota terpadu, termasuk pemeliharannya. Oleh itu, infrastruktur yang dibangun benar-benar menolong arus perdagangan antara daerah, sehingga dapat mewujudkan sosial ekonomi warga kota Medan. Ekonomi yang berjaya diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah kota

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Medan dalam pembangunan, serta mengurangi permintaan dana Pemerintah Kota kepada Pemerintah Pusat.¹⁶

Selanjutnya dengan masuknya para pelabor asing telah memperluas lapangan kerja bagi warganya tentang pembangunan ekonomi ini, Walikota Medan penggal 2005-2010 mengemukakan :

Kita memanfaatkan potensi Medan asebagai ibu kota provinsi Sumatera Utara yang memiliki populasi 12 juta jiwa, Provinsi Banda Aceh sekitar 4 juta jiwa, Provinsi Sumatera Barat 3-4 juta jiwa, provinsi Riau Kepulauan (Kepri) sekitar 3 juta jiwa, lalu Malaysia Utara dengan jumlah penduduk 22 juta jiwa, Penang dan beberapa daerah lain juga menjadi kontribusi signifikan dalam hal populasi penduduk. Jika kita ambil 10% saja maka itu sekitar 2,2 juta. Jadi, secara totalitas ada potensi 26 juta penduduk. Jika dari jumlah penduduk diambil 20% saja, maka ada potensi 5,2 juta orang yang melakukan aktivitas di Medan. Dari mereka kita boleh menambah *revenue* APAD (Anggaran Penghasilan Asli Daerah) untuk menyejahterakan rakyat. Ini kan kota, kita tidak punya lahan industri, kita juga tidak punya lahan pertanian. Karena itu kita mesti menghimpun dana APAD dari sector jasa. Orang ke kota datang pasti belanja, rekreasi, makan dan tidur yang akan menghasilkan pajak untuk APAD. Dari pemasukan ini kita menyejahterakan masyarakat yang 2 juta, termasuk yang di pinggiran. Tahun 2005 merupakan langkah awal untuk membangun pinggiran.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Syahrin Harahap, *Cahaya Kota Medan, Latar Belakang dan Cita-cita Keislaman*, Jakarta : PT.RajaGrafindo, 2005. h. 8283.

Melihat realiti di atas, maka dapat dikatakan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat Medan penuh dinamik serta memiliki harapan yang baik ke depan, bila pengurusan kota benar-benar mengamalkan pelbagai aturan yang telah dibuat secara konsisten dan istiqamah.

Di kota Medan, boleh dikatakan perkembangan ekonomi dalam negeri sangat cepat, terutama pembangunan pusat-pusat perbelanjaan modern (Plaza) tingkat nasional dan antarabangsa. Sehingga tidak hairan ramai pelancong datang berkunjung ke kota Medan untuk membeli pelbagai barangan, yang murah tetapi berkualitas.

Walaupun diakui, bahwa urusan lalu lintas masih perlu diperbaiki. Hal ini, dapat difahami, karena dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang disediakan oleh pemerintah untuk kota Medan masih terhad. Pembangunan kota Medan, selain mengharapkan dana dari pemerintah, namun sektor swasta memberikan sokongan yang cukup besar terhadap perkembangan dan kemajuan kota Medan.

Selanjutnya, kehidupan politik masyarakat boleh dikatakan sangat baik. Ini dapat dilihat pada proses dan hasil Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yang pertama diadakan di

kota Medan pada bulan Jun 2005, berjalan dengan tertib, tidak ada konflik yang mengganggu proses Pilkada tersebut. Masing-masing parti politik sudah faham dalam mengamalkan tugasnya. Walaupun ada sedikit terjadi konflik, tetapi tidak sampai merosak proses pilihan raya tersebut.

Undang-Undang No : 32 tahun 2004 telah membawa perubahan, baik secara filosofi maupun administratif penyelenggaraan Pemerintahan Kota. Secara filosofi, Undang – Undang tersebut menetapkan bahwa¹⁸ :

- Semua masalah diselesaikan di tingkat daerah.
- Semua daerah mesti berkembang dengan, kreativiti dan inovasi daerah masing- masing.
- Mengubah pandangan kesatuan, dari yang semula mesti sama menjadi pengakuan adanya keanekaragaman, sebagai potensi bangsa/daerah.
- Adanya perubahan dari yang semula banyak pengaruh eksekutif menjadi sama dengan Legislatif.
- Perlunya sokongan masyarakat yang dinamik dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan kota.

Pemerintah Kota Medan, dengan perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota tersebut,

¹⁸ Lihat [www.http://pemkomedan.go.id](http://pemkomedan.go.id). Khususnya berkaitan dengan ekonomi dan politik.

telah membuat program Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kota Medan lima tahun kedepan, dengan menetapkan Pemerintah Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), swasta dan masyarakat sebagai sokongan utama pembangunan kota.

Demikianlah kondisi kehidupan ekonomi dan politik masyarakat kota Medan. Boleh dikatakan memiliki harapan yang cerah ke depan, menjadi kota yang menerima masyarakat untuk melakukan aktiviti dengan tenang dan damai, demikian juga untuk melakukan aktiviti politik dengan rukun dan damai tanpa dipaksa oleh pihak majoriti.

Kehidupan Keagamaan

Untuk mengetahui jumlah penganut agama dan jenis etnik penduduk kota Medan dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 4

**PENDUDUK KOTA MEDAN MENURUT AGAMA
DAN ETNIK TAHUN 2008¹⁹**

¹⁹Sumber : BPS Kota Medan 2008.

No	Agama	Jumlah	%	Keterangan
01	Islam	1.370.656	65	Melayu, Mandailing, Jawa, Padang, Aceh, Arab
02	Kristian (Protestan & Katholik)	412.398	20	Batak, Karo, Dairi, Simalungun
03	Buddha	184.499	8	Cina, Karo, India
04	Hindu	90.342	4	Bali, Cina, Karo, India
05	Lain-lain	58.920	3	Cina, Jawa
	Jumlah	2.010.675	100	

Dapat dikemukakan di sini bahwa etnik atau suku asli Sumatera Utara ada 8 (delapan) etnik, iaitu: Melayu, Karo, Simalungun, Batak, Pesisir, Mandailing, Pak-Pak, dan Nias. Semua etnik tersebut terdapat di kota Medan. Selain itu masih banyak terdapat etnik pendatang yang semuanya bersatu secara sosial.

Tabel 5

**SARANA RUMAH IBADAH
UMAT BERAGAMA KOTA MEDAN TAHUN 2008²⁰**

No	Rumah Ibadah	Jumlah	Perbandingan Rumah Ibadah dan Umat
01	Masjid	756	1 : 1580
02	Gereja	370	1 : 1187
03	Kuil	42	1 : 5110
04	Vihara	126	1 : 652

Dengan rumah ibadah tersebut, kehidupan beragama di kota Medan secara am berjalan rukun dan damai. Persoalan yang muncul adalah hanya konflik kecil yang tidak menimbulkan akibat yang besar, sebagaimana terjadi di Poso (Sulawesi). Terjadinya keharmonian dalam keberagamaan masyarakat di kota Medan, selain masyarakatnya sudah memiliki kesedaran akan bahayanya konflik yang ditimbulkan akibat perselisihan antara umat beragama, juga masyarakat kota Medan tidak suka dengan isu-isu yang tidak berfaedah.²¹

²⁰Sumber : BPS Kota Medan 2008.

²¹ Konflik antara umat beragama yang terjadi di daerah Indonesia, antra lain di Aceh dan Ujung Pandang. Lihat M.Natsir (1983), *Mencari Modus Vivendi Anta Umat Beragama di Indonesia*, Jakarta : Media Dakwah,h. 6-7.

Rumah-rumah ibadah umat beragama yang ada di kota Medan tidak pernah diganggu oleh umat-umat lainnya. Walaupun adanya bom yang meletus di gereja,²² itu bukan karena umat beragama, tetapi adalah kes-kes dari pihak luar kota Medan, untuk mengacaukan kehidupan umat beragama di kota Medan yang memang sangat baik, berbanding kota-kota lain di Indonesia.

Boleh dikatakan rumah-rumah ibadah terus bertambah jumlahnya sesuai dengan perkembangan masyarakatnya yang majmuk. Kota Medan, yang menurut Walikota (periode 2005-2010) ingin menjadikan kota metropolis yang religi. Artinya kota yang selalu mengikuti perkembangan sains dan teknologi serta masyarakat moden, tapi tetap dalam masing-masing keyakinan, yang dimiliki warganya. Sehingga aktiviti kehidupan keagamaan di Medan adalah suatu tanda warganya ingin

²² Bom ada meletus di kota Medan, tetapi bukan berlatar belakang permasalahan keagamaan. Namun bila menelaah masa lalu, pada daerah lain di Indonesia, pada tahun 1969, para pemuda Islam di pinggiran Jakarta menghancurkan sebuah gereja Protestan. Insiden serupa juga menjalar ke pelbagai pelosok Nusantara seperti Jati Barang, Jawa Barat dan Purwodadi, Jawa Tengah. Lihat, Lukman harun, *"Endeavors to Create Religious harmony Believers of Different Relligions in Jakarta.:"* dalam Konferensi Indonesia-Australia yang bertajuk *Understanding Neighboring*, tarikh 2-5 Februari 1991. Melborne : Monasy University., h.2-6.

mewujudkan kota Medan sebagai kota Madani artinya kota yang berperadaban.²³

2. Profil Perguruan Tinggi Negeri Kota Medan

Kota Medan memiliki tiga Perguruan Tinggi Negeri, yaitu Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Negeri Medan (Unimed) dan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (IAIN SU). Dari ketiga PTN tersebut yang menjadi lokasi penelitian adalah USU dan Unimed. Oleh karena itu kedua PTN tersebut yang akan dikemukakan profilnya di sini.

a. Universitas Sumatera Utara (USU)

Sejak awal pendiriannya, USU dipersiapkan menjadi pusat pendidikan tinggi di Kawasan Barat Indonesia. Sewaktu didirikan pada tahun 1952, USU merupakan sebuah Yayasan, kemudian beralih status menjadi PTN pada tahun 1957, dan selanjutnya berubah menjadi PT-BHMN pada tahun 2003.

Kampus USU berlokasi di Padang Bulan, sebuah area yang hijau dan rindang seluas 120 ha yang terletak di tengah Kota Medan. Zona akademik seluas 90 ha menampung hampir seluruh kegiatan perkuliahan dan praktikum mahasiswa. Sistem

²³ Lihat [www.http://pemkomedan.go.id](http://pemkomedan.go.id). Khususnya berkaitan dengan kehidupan keagamaan di kota Medan.

pembelajaran didukung oleh fasilitas perpustakaan dan lebih dari 200 laboratorium. Perpustakaan menyediakan berbagai jenis sumber belajar baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Perpustakaan USU merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia saat ini. Kampus Padang Bulan juga didukung oleh infrastruktur teknologi informasi untuk memfasilitasi akses terhadap berbagai sumber daya informasi dan pengetahuan untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian mahasiswa dan dosen. Selain itu di dalam kampus juga terdapat berbagai sarana seperti asrama, arena olah raga, wisma, kafetaria, toko, bank, dan kantor pos. Wisuda dan berbagai acara akademik lainnya diadakan di Auditorium dan Gelanggang Mahasiswa. Sebuah rumah sakit pendidikan yang berlokasi di kampus Padang bulan telah dimulai pembangunannya sejak Agustus 2009.

Sebuah kampus baru seluas 300 ha yang berlokasi di Kwala Bekala, berjarak 15 km dari Kampus Padang Bulan sedang dikembangkan, yang saat ini digunakan untuk mendukung berbagai penelitian dan percobaan di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, dan peternakan. Dalam upaya mengembangkan diri sebagai universitas berjangkauan luas, USU mengelola Kebun Percobaan seluas sekitar 550 ha di Langkat. USU juga telah memperoleh izin pengembangan hutan percontohan seluas 10.000 ha di Mandailing Natal. USU memiliki 14 fakultas/sekolah yaitu Kedokteran, Hukum,

Pertanian, Teknik, Kedokteran Gigi, Ekonomi, Sastra, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kesehatan Masyarakat, Farmasi, Psikologi, Keperawatan dan Pascasarjana. Jumlah program studi yang ditawarkan sebanyak 135, terdiri dari 19 tingkat doktoral, 32 magister, 18 spesialis, 5 profesi, 46 sarjana, dan 15 diploma. Jumlah mahasiswa terdaftar saat ini lebih dari 33.000 orang, 1000 di antaranya adalah mahasiswa asing.

Diawali dengan membuka sekolah kedokteran, USU memposisikan diri sebagai universitas unggulan. Proses pendidikan dan penelitian melibatkan 1.632 orang dosen, 81% di antaranya memiliki latar belakang pendidikan pascasarjana. Hingga saat ini USU memiliki lebih dari 103.000 alumni yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Sejumlah alumni menempati posisi penting di berbagai sektor kerja, baik pemerintahan maupun swasta. Penataan dan pengembangan sistem penjaminan mutu, yang didukung dengan komitmen tinggi para manajer di semua lini, dilakukan secara terus-menerus dan menjadi agenda utama USU dalam upaya menghasilkan lulusan dan produk terbaik.

Pimpinan Universitas

1957-1958	Z. A. Soetan Koemala Pontas, Ketua Presidium
1958-1962	Prof. Dr. Ahmad Sofian, Presidium
1962-1964	Prof. Mr. Mahadi, Ketua Presidium
1964-1965	Ulung Sitepu, Presidium
1965-1966	Drg. Nazir Alwi, Rektor
1966 (Mei-Nov)	Prof. Dr. S. Hadibroto, M.A., Pejabat Rektor
1966-1970	Dr. S. Harnopidjati, Rektor
1970-1978	Harry Suwondo, SH, Rektor
1978 (Mei-Juli)	O. K. Harmaini, SE, Ketua Rektorium
1978-1986	Dr. A. P. Parlindungan, SH, Rektor
1986-1994	Prof. M. Jusuf Hanafiah, Rektor
1994-2010	Prof. Chairuddin P. Lubis, D.T.M.&H., Sp.A.(K), Rektor
2010-2015	Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc.(CTM), Sp.A.(K)

b. Universitas Negeri Medan (Unimed)

Universitas Negeri Medan (Unimed) pada awalnya berasal konversi IKIP Medan. Perubahan kelembagaan menjadi Universitas Negeri Medan yang peresmiannya dilaksanakan pada bulan Februari 2000 dengan SK. Presiden No.124 Tahun 1999, tanggal 7 Oktober 1999 menyebabkan terjadinya perubahan fungsi lembaga dan yang sebelumnya hanya mengelola bidang-bidang jurusan//pogram studi kependidikan, yaitu Sarjaana Pendidikan (S.Pd), setelah menjadi universitas juga menamatkan Sarjana Sains (S.Si) di bidang jurusan/program studi non kependidikan.

Adapun lokasi Unimed terletak di Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate. Berdekatan dengan tiga perguruan tinggi, yaitu; Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (IAIN SU), Universitas Amir Hamzah dan Universitas Medan Area. Rektornya kini bernama Prof.Dr.Syawal Gultom, M.Pd.

3. Visi, Misi, Perguruan Tinggi Negeri Kota Medan

Mengikuti Penjelasan pada poin di atas, maka visi dan misi kedua PTN tersebut di atas yang akan uraikan, yaitu sebagai berikut.

a. Visi dan Misi dan Tujuan Universitas Sumatera Utara (USU)

Visi:

University for Industry.

Misi:

1. Mempersiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat akademik dan profesional dalam menerapkan, mengembangkan pengetahuan ilmiah, teknologi dan seni, serta berdaya saing tinggi.
2. Memperluas partisipasi dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam pembelajaran dan modernisasi cara pembelajaran.

3. Mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan ilmiah, teknologi, seni, dan rancangan penerapannya untuk mendukung produktivitas dan daya saing masyarakat.

Tujuan:

1. Memperluas partisipasi dalam pelayanan pendidikan bagi masyarakat dalam mendukung pemenuhan pendidikan nasional serta memodernisasi cara pembelajaran.
2. Meningkatkan partisipasi aktif dalam pengembangan ilmiah, teknologi dan seni/budaya serta kemanusiaan.
3. Mengembangkan pusat informasi serta sistem teknologi komunikasi dan sistem penjaminan mutu yang handal.
4. Membangun sistem tata pamong universitas yang efektif, efisien dan demokratis.
5. Mewujudkan lingkungan pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.
6. Memperkuat departemen dalam pengelolaan disiplin silang antar departemen/program studi.
7. Membangun kemampuan pendanaan sendiri melalui kerjasama/kemitraan dalam usaha-usaha ventura.
8. Mengembangkan kemampuan dalam memasarkan produk-produk pengetahuan ilmiah, konsep-konsep,

pemecahan masalah industrial, jasa tenaga ahli, dan lain-lain.

9. Membangun pendekatan baru dalam pembelajaran yang berfokus kepada pembelajaran sesuai kebutuhan (demand-driven learning system)

b. Visi dan Misi dan Tujuan Universitas Negeri Medan (Unimed)

Visi :

Universitas yang unggul dalam bidang pendidikan, industri dan pariwisata.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan p[engabdian kepada masyarakat.
2. Mengembangkan Unimed menjadi teaching and research institution yang unggul.
3. Mengembangkan budaya kewirausahaan.
3. Menumbuhkan budaya ilmiah di kalangan warga Unimed.
5. Membina suasana akademik dan iklim organisasi yang sehat.

Tujuan :

1. Lulusan yang unggul dan profesional.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
3. menghasilkan dan mengembangkan karya-karya inovatif dan produktif.

4. Profil Informan Penelitian

a. Prof. Dr. Ibrahim Gultom, M. Pd.

Prof. Dr. Ibrahim Gultom, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan, golongan IV/b, laki-laki, usia 53 tahun, alamat rumah jalan Purnawirawan No. 17 Komplek Veteran Medan,

b. Prof. Dr. Yusnadi, MS

Prof. Dr. Yusnadi, MS, guru besar Universitas Negeri Medan, golongan IV/c, laki-laki, usia 49 tahun, alamat rumah jalan Juang 45 N0. 59 Medan.

c. Prof. Dr. Suwardi Lubis, MS.

Prof. Dr. Suwardi Lubis, MS, guru besar Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, golongan IV/e, laki-laki, usia 53 tahun, alamat rumah komplek perumahan dosen USU Medan.

d. Drs. Humaizi, MA.

Drs. Humaizi, MA, adalah dosen FISIP Universitas Sumatera Utara, golongan IV/c, laki-laki, usia 50 tahun. Alamat rumah, Jalan Sawit No. 7 Medan..

e. Amir Fadli Nasution

Amir Fadli Nasution, mahasiswa semester III Ilmu Komunikasi Fisip USU, usia 19 tahun, laki-laki, pekerjaan orangtua wiraswasta, alamat pasar IX Tembung.

f. Maulana Andinata Dalimunthe

Maulana Andinata Dalimunthe, mahasiswa semester III Ilmu Komunikasi Fisip USU, usia 18 tahun, laki-laki, pekerjaan orangtua dosen, alamat jalan Tuasan Gang Kasturi No. 3 Medan.

g. Fakhrurrozi

Fakhrurrozi, mahasiswa semester IX Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan, laki-laki, usia 21 tahun, alamat rumah jalan Brigjen Hamid gang Amat no. 2 Medan.

h. M. Syuaib Ambarita

M. Syuaib Ambarita mahasiswa semester III program studi Bimbingan Konseling Universitas Negeri Medan, laki-laki, usia 19 tahun, alamat rumah Jalan Tempuling Gang Bersama Masjid Mutmainnah Medan.

B. Pengetahuan Masyarakat Kampus tentang Nikah Siri

Peneliti dalam menggali respons masyarakat kampus tentang nikah siri adalah melalui wawancara. Penelusurannya adalah informan yang berasal dari masyarakat kampus Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Negeri Medan (UNIMED).

Menurut Prof. Dr. Ibrahim Gultom, M.Pd,²⁴ nikah siri ialah pernikahan tanpa melalui prosedur administrasi, disebut juga nikah di bawah tangan, tetapi harus memenuhi syariatnya. Nikah siri umumnya dilakukan oleh orang-orang yang ingin beristri dua. Menurutny, tujuan nikah siri ialah untuk keamanan diri agar tidak diketahui oleh istri pertama dan keluarganya, sehingga tidak merusak keharmonisan keluarga. Agama membolehkan nikah siri asalkan syariatnya betul dilaksanakan.

Lebih lanjut Prof. Dr. Ibrahim Gultom, M.Pd, menyatakan bahwa manfaat nikah siri ialah untuk menyelamatkan wanita yang susah dapat jodoh sehingga ia tertolong, satu segi bisa juga mengangkat harkat dan martabat wanita, karena dapat menyelamatkan wanita dari berbuat zina. Mudaratnya tidak terlalu banyak asalkan syariatnya betul-betul dilaksanakan, serta bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban sebagai mana syariat Islam menetapkan hukum pernikahan. Tetapi kalau motif pelampiasan nafsu saja, tentunya ini akan berdampak negatif bagi perempuan, karena laki-laki mudah saja menceraikan perempuan sebab pernikahan mereka tidak tercatat secara administrasi, tidak ada dokumen negara.

²⁴ Wawancara dengan Prof. Dr. Ibrahim Gultom, M.Pd, beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan, golongan IV/b, laki-laki, usia 53 tahun, wawancara dilakukan di Medan pada hari Jumat tanggal 17 September 2010.

Dalam hal ini anak-anak bisa terlantar, dan tidak ada hak waris menurut hukum kenegaraan.

Selanjutnya menurut Prof. Dr. Yusnadi, MS,²⁵ nikah siri ialah nikah secara diam-diam, nikah yang tidak diketahui oleh istri tua dan keluarga. Tujuan nikah siri ialah untuk tidak melakukan zina di luar nikah. Menurut agama membolehkan nikah siri, asal sesuai dengan syariat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi orang yang melakukan nikah siri ialah harus mampu dari segi ekonomi dan adil. Manfaat nikah siri ialah untuk menghindari suami dari berbuat zina, dan juga dapat membantu ekonomi si perempuan. Mudaratnya adalah adanya pandangan negatif dari masyarakat karena nikah diam-diam tadi.

Menurut Prof. Dr. Suwardi Lubis, MS,²⁶ nikah sirih itu ialah nikah yang tidak tercatat secara administrasi di Kantor Urusan Agama setempat. Tujuan nikah sirih bermacam-macam, ada karena rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat sehingga merasa tidak perlu nikahnya dilakukan secara tercatat dan resmi, dan tidak terpikir bagaimana efeknya kelak kepada keturunannya. Ada juga karena faktor

²⁵ Wawancara dengan Prof. Dr. Yusnadi, MS, guru besar Universitas Negeri Medan, golongan IV/c, laki-laki, usia 49 tahun, wawancara dilakukan di Medan pada hari Jumat tanggal 17 September 2010.

²⁶ Wawancara dengan Prof. Dr. Suwardi Lubis, MS, guru besar Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, golongan IV/e, laki-laki, usia 53 tahun, wawancara dilakukan di Medan hari Sabtu, tanggal 18 September 2010.

ekonomi, dengan nikah sirih mereka memandang biayanya relatif lebih rendah. Ada juga yang melakukan nikah sirih karena faktor keamanan rumah tangganya terutama bagi mereka yang sudah mempunyai istri pertama dan anak-anak.

Nikah sirih yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun nikah yang berlaku dalam agama Islam jelas syah menurut agama Islam, masalahnya terkait dengan undang-undang dan peraturan negara yang mengharuskan setiap pernikahan harus tercatat secara resmi di KUA, kalau tidak nikahnya dipandang nikah siri. Syarat-syarat nikah siri tidak berbeda dengan nikah yang resmi dan tercatat tadi, yaitu ada calon suami, calon istri, wali, saksi, mahar dan ijab kabul, bedanya hanya masalah tercatat atau tidak di KUA. Manfaat nikah siri sebenarnya hanya mempermudah proses saja, tidak mesti harus mengikuti prosedur birokrasi pemerintah.

Tetapi mudaratnya juga ada terutama bagi pendidikan anak-anak, kita tahu bahwa setiap sekolah meminta kartu keluar, akte kelahiran dll yang hanya dapat diperoleh apabila melakukan nikah secara resmi menurut aturan pemerintah, jadinya ada kendala administrasi. Begitu juga nikah siri itu bisa menimbulkan fitnah terutama jika pria itu mempunyai istri lebih dari satu, bisa terjadi disharmonisasi dalam rumah tangga.

Selanjutnya menurut Drs. Humaizi, MA,²⁷ nikah siri adalah nikah secara diam-diam dan tidak tercatat di KUA, tetapi secara syariat agama Islam hal itu syah. Sebab, nikah siri tersebut melaksanakan serta mengikuti apa yang menjadi rukun dan persyaratan pernikahan secara hukum Islam, hanya saja bedanya nikah tersebut tidak tercatat di KUA. Nikah siri menurut Humaizi, memiliki kelemahan, di antaranya; bila suatu saat suami menceraikan istrinya tersebut, maka status anaknya mengikut garis keturunan ibunya, bukan ayahnya, karena tidak tercatat dalam administrasi negara. Jika, menurut haknya, baik untuk anaknya maupun istrinya tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, sebab tidak memiliki bukti yang otentik secara hukum positif di Indonesia. Adapun alasan orang melakukan nikah siri, menurutnya antara lain; menghindarkan perbuatan zina, disebabkan pertamanya tidak menarik lagi, tidak memiliki keturunan, karena takut bila nikah secara formal terjadinya disharmonisasi.

Menurut Amir Fadli Nasution,²⁸ nikah siri secara etimologis ialah tersembunyi, dan secara terminologis ialah nikah yang dilakukan tanpa adanya status hukum yang jelas dari

²⁷ Wawancara dengan Drs. Humaizi, MA, adalah dosen FISIP Universitas Sumatera Utara, golongan IV/c, laki-laki, usia 50 tahun, wawancara dilakukan di Medan hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2010.

²⁸ Wawancara dengan Amir Fadli Nasution, mahasiswa semester III Ilmu Komunikasi Fisip USU, usia 19 tahun, laki-laki, pekerjaan orangtua wiraswasta, wawancara dilakukan di Medan pada hari Kamis, tanggal 16 September 2010.

negara Indonesia, walaupun syah secara agama (Islam). Tujuan nikah siri ialah untuk menghindarkan pelaku nikah siri dari perbuatan zina. Nikah siri menurutnya dibolehkan oleh agama, tetapi harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Syarat-syarat nikah siri menurut Amir Fadli Nasution: balig, berakal, yang paling penting ada situasi atau kondisi yang membuat pelaku perlu melaksanakan nikah siri tersebut. Contoh: dalam keadaan perang. Manfaatnya menurutnya ialah menghindarkan diri dari zina, lebih menghormati dan menghargai kaum perempuan. Sedangkan mudaratnya tidak syah secara hukum negara Indonesia, keturunan yang dihasilkan nikah siri tidak diakui negara Indonesia, kurangnya tanggung jawab dari pihak pria.

Menurut Maulana Andinata Dalimunthe,²⁹ Nikah siri ialah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang secara sembunyi-sembunyi, dan tidak syah secara hukum negara Indonesia. Tujuan nikah siri ialah untuk menghindarkan pelaku nikah siri dari perbuatan zina. Nikah siri menurutnya dibolehkan oleh agama, karena lebih menghargai kaum perempuan. Syarat-

²⁹Wawancara dengan Maulana Andinata Dalimunthe, mahasiswa semester III Ilmu Komunikasi Fisip USU, usia 18 tahun, laki-laki, pekerjaan orangtua dosen, wawancara dilakukan di Medan pada hari Rabu, tanggal 15 September 2010.

syarat nikah siri menurutnya ialah balig, berakal, mampu secara ekonomi.

Manfaat nikah siri menurutnya ialah menghargai dan menghormati kaum perempuan, menghindarkan pelaku nikah siri dari perbuatan zina. Mudaratnya ialah kaum perempuan bisa ditinggalkan oleh suami begitu saja karena tidak ada status hukum yang jelas, dan tidak syah secara hukum negara Indonesia.

Menurut Fakhurrozi,³⁰ nikah siri identik dengan nikah di bawah tangan, tanpa legalitas dari pemerintah, hanya memenuhi syarat syariat Islam. Tujuan nikah siri kebanyakan adalah untuk mempermudah administrasi, bisa juga faktor ekonomi, faktor dorongan dalam diri, ada rasa malu kalau dilegalkan, takut ketahuan kalau yang bersangkutan mempunyai istri kedua atau ketiga.

Menurut Fakhurrozi, agama membolehkan nikah siri asalkan sesuai dengan syariatnya, tetapi cenderung bersifat makruh. Syarat nikah siri tidak berbeda dengan nikah biasa, sama saja. Manfaat nikah siri lebih bersifat pribadi, seperti murah dari segi biaya. Mudaratnya dapat menimbulkan fitnah dalam

³⁰ Wawancara dengan Fakhurrozi, mahasiswa semester IX Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan, laki-laki, usia 21 tahun, wawancara dilakukan di Medan pada hari Jumat, tgl 17 September 2010.

masyarakat, karena nikahnya tidak diketahui masyarakat, di samping itu bertentangan dengan peraturan pemerintah karena tidak sesuai dengan hukum negara.

Menurut M. Syuaib Ambarita,³¹ nikah siri itu ialah nikah secara rahasia tanpa diketahui oleh istri pertama (kalau yang sudah menikah), tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi tetap memenuhi syarat-syarat nikah yang berlaku dalam agama Islam. Tujuan nikah siri ialah untuk keamanan bagi pria yang sudah beristri sehingga tidak cecok dengan istri pertama, bisa juga faktor biaya yang relatif lebih murah dan prosedur administrasi yang tidak memerlukan urusan administrasi di KUA.

Nikah sirih dibolehkan oleh agama Islam asalkan memenuhi syariatnya. Syarat-syarat nikah sirih sama dengan syarat-syarat untuk pernikahan yang resmi. Manfaat nikah sirih dapat menghindarkan pria dari perbuatan zina. Mudaratnya apabila istri pertama (bagi yang sudah menikah) mengetahui di belakang hari, maka akan terjadi percekcoan dalam keluarga, kemudian anak-anak yang dihasilkan dari nikah sirih akan

³¹ Wawancara dengan M. Syuaib Ambarita mahasiswa semester III program studi Bimbingan Konseling Universitas Negeri Medan, laki-laki, usia 19 tahun, wawancara dilakukan di Medan pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2010.

mengalami masalah administrasi ketika mereka mau masuk sekolah.

Semua informan di atas memberikan pandangan bahwa nikah siri hukumnya sah, jika pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam, yaitu telah terpenuhinya syarat dan rukunya.³²

Pada dasarnya perbedaan signifikan dalam terminologi pernikahan siri dalam perspektif fikih dan hukum positif Indonesia adalah nikah yang dilaksanakan tanpa adanya pencatatan di KUA. Namun dalam perspektif fikih, terminologi ini sangat berbeda. Dalam perspektif fikih dimaknakan sesuai dengan artinya secara etimologi, yaitu pernikahan secara sengaja dengan cara diam-diam dan rahasia, tanpa diketahui oleh khalayak umum.

Adapun istilah nikah siri, secara terminologi dikenal di kalangan fukahah' Malikiyah, hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa fikih klasik berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada masa sekarang. Pada masa fikih klasik yang dimaksud

³² Adapun yang menjadi rukun nikah adalah (1) calon suami, (2) calon istri, (3) wali nikah, (4) dua orang saksi, dan (5) ijab dan qabul, sedangkan syaratnya adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam setiap kelima rukun nikah yang ada tersebut. Lihat, Imam Abi Zakariya Yahya bin Syarif an-Nawawi ad-Damsiqi, *Raudat at-Talibin*, (Beirut-Lebanon: Dal al-Kitab al-Ilmiah,t.t.), h.397-382. Lihat juga, Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. IV, (Jakarta : Rajawali Pers, 2000). H. 65-67.

nikah siri adalaah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinannya menurut syariat. Saksi dalam pernikahan tersebut diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya pernikahan kepada masyarakat.

Nikah siri yang kemudian dipahami sebagai persyaratan kepada saksi untuk tidak berbicara kepada orang lain. Pemahaman dan pengertrian ini pun pada dasarnya bertentangan dengan semangat dan tujuan sebuah persaksian, yaitu agar dapat terhindar dari fitnah. Tujuan persaksian adalah sebagai justifikasi orang lain terhadap sebuah pernikahan, sehingga dapat dibedakan antara nikah yang halal dan nikah yang diharamkan.

Namun demikian, dalam perspektif fikih nikah siri tersebut pada dasarnya sah, jika memang terpenuhinya segala rukun dan syarat yang ada di dalam pernikahan itu sendiri. Hal ini pulalah yang banyak dipahami oleh mayoritas masyarakat kampus. Jika kita merujuk dari pandangan dan pemahaman mereka yang digali melalui wawancara.

C. Sikap Masyarakat Kampus tentang Pelaku Nikah Siri

Berdasarkan penelitian lapangan yang di lakukan untuk mengidentifikasikan tentang sikap masyarakat kampus terhadap pelaku nikah siri, dengan cara melakukan wawancara dengan

beberapa informan penelitian. Jika diidentifikasi respons masyarakat kampus terhadap pelaku nikah siri terbagi dua, ada yang memandang hal yang biasa saja, dan itu dibenarkan dalam ajaran Islam kalau dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan. Pandangan yang pertama ini peneliti kelompokkan dengan mereka yang merespon positif terhadap pelaku nikah siri. Sedangkan pandangan yang kedua, mereka yang merespon negatif. Berikut hasil dari wawancara peneliti.

1. Kelompok yang memandang positif terhadap pelaku nikah siri

Mereka adalah terdiri dari para dosen di kampus, baik di USU maupun di UNIMED, mereka itu adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Prof. Dr. Ibrahim Gultom, M.Pd,³³ sampai saat ini beliau tidak ada berkeinginan untuk melakukan nikah siri, tetapi ke depan wallohu a'lam, katanya. Ia tidak menghujat orang-orang yang melakukan nikah siri, asal syariatnya dilaksanakan dan bertanggung jawab. Sarannya kepada orang yang melakukan nikah siri agar dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan jangan hanya dijadikan untuk pelampiasan nafsu saja.

³³Wawancara dengan Prof. Dr. Ibrahim Gultom, M.Pd, beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan, golongan IV/b, laki-laki, usia 53 tahun, wawancara dilakukan di Medan pada hari Jumat tanggal 17 September 2010.

- b. Menurut Prof. Dr. Yusnadi, MS,³⁴ beliau tidak mempunyai keinginan untuk melakukan nikah siri karena banyak pertimbangan terutama pertimbangan anak dan istri takut terancam. Pandangannya terhadap orang yang melakukan nikah siri positif saja asalkan maksudnya baik. Saran beliau agar orang yang melakukan nikah siri harus berbuat adil, baik dari segi waktu maupun ekonomi.
- c. Menurut Prof. Dr. Suwardi Lubis, MS,³⁵ Niat melakukan nikah siri sampai saat ini tidak ada, karena banyak pertimbangan yang harus dipikirkan. Mereka yang melakukan nikah siri adalah hak mereka, silakan saja asalkan didasarkan kepada tanggung jawab, niat yang baik dan adil sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam ajaran agama Islam.
- d. Menurut Drs. Humaizi, MA, beliau sampai saat ini tidak punya keinginan untuk nikah siri, sebab istrinya sangat loyalitas dan telah berjasa dalam membangun bahtera rumah tangga. Sebab, istrinya, sebelumnya nikah beragama non Muslim (Buddha) setelah nikah ia

³⁴Wawancara dengan Prof. Dr. Yusnadi, MS, guru besar Universitas Negeri Medan, golongan IV/c, laki-laki, usia 49 tahun, wawancara dilakukan di Medan pada hari Jumat tanggal 17 September 2010.

³⁵Wawancara dengan Prof. Dr. Suwardi Lubis, MS, guru besar Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, golongan IV/e, laki-laki, usia 53 tahun, wawancara dilakukan di Medan pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2010.

berkorban untuk mengikutinya dengan masuk agama Islam, inilah pengorbanan yang menurutnya sangat besar. Padahal, keluarganya tergolong keluarga yang memiliki finansial berlebih, itu semua ditinggalkannya demi cintanya pada beliau. Namun, katanya, ke depan kalau situasi sudah berubah Allah jugalah yang Maha Tahu. Bagi mereka yang melakukan nikah siri menurutnya, silahkan saja, asalkan sesuai dengan aturan agama. Hanya, saja ia menyarankan sebaiknya dihindarkanlah nikah siri, sebab mudaratnya lebih banyak.

- e. Menurut Amir Fadli Nasution,³⁶ untuk saat ini dia tidak ada niat untuk melakukan nikah siri, sebab belum tahu kehidupan masa depan. Sikapnya terhadap orang yang melakukan nikah siri tidak ada masalah, karena setiap orang berhak melakukannya jika ia berkeinginan. Sarannya kepada orang yang melakukan nikah siri: jangan terlalu melarang atau mengekang orang lain untuk melakukan nikah siri tersebut.

³⁶ Wawancara dengan Amir Fadli Nasution, mahasiswa semester III Ilmu Komunikasi Fisip USU, usia 19 tahun, laki-laki, pekerjaan orangtua wiraswasta, wawancara dilakukan di Medan pada hari Kamis, tanggal 16 September 2010.

- f. Menurut Maulana Andinata Dalimunthe,³⁷ ia tidak ada niat untuk melakukan nikah siri, karena ingin tetap setia kepada istri. Sikapnya terhadap orang yang melakukan nikah siri tidak ada masalah, asalkan kaum pria bertanggung jawab dan menghargai kaum perempuan yang dinikahinya secara siri tersebut. Sarannya jangan terlalu menjelek-jelekkan nikah siri sebelum mengetahui tujuan atau motif yang jelas dari mereka yang melakukan nikah siri.

2. Kelompok yang memandang negatif terhadap pelaku nikah siri

Mereka adalah terdiri dari para mahasiswa di kampus, baik di USU maupun di UNIMED, mereka itu adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Fakhurrozi,³⁸ Ia tidak ada niat untuk melakukan nikah siri karena menurut pandangannya, nikah siri itu lebih besar mudarat dari manfaatnya. Sikapnya terhadap orang yang melakukan nikah siri itu merupakan perbuatan rendah dan dipandanginya sebagai suatu aib.

³⁷ Wawancara dengan Maulana Andinata Dalimunthe, mahasiswa semester III Ilmu Komunikasi Fisip USU, usia 18 tahun, laki-laki, pekerjaan orangtua dosen, wawancara dilakukan di Medan pada hari Rabu, tanggal 15 September 2010.

³⁸ Wawancara dengan Fakhurrozi, mahasiswa semester IX Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan, laki-laki, usia 21 tahun, wawancara dilakukan di Medan pada hari Jumat, tgl 17 September 2010.

Sarannya agar jangan melakukan nikah siri lebih baik menikah secara formal.

- b. Menurut M. Syuaib Ambarita,³⁹ beliau tidak ada niatnya untuk melakukan nikah sirih karena takut akan menuai berbagai masalah. M. Syuaib merasa kurang simpati dengan orang yang melakukan nikah sirih, sebab dipandanginya sebagai perbuatan yang kurang baik dan tidak lazim. Sarannya, jangan melakukan nikah sirih, lebih baik resmi dan tercatat saja sehingga tidak timbul masalah di belakang hari.

D. Perilaku Masyarakat Kampus tentang Nikah Siri

Berdasarkan survey dan riset peneliti di lapangan, masyarakat kampus yang melakukan nikah siri tidak ingin diinformasikan kepada orang lain, sehingga memang agak sulit menemukan orang yang melakukan nikah siri untuk diajak wawancara. Mereka mau diajak wawancara jika identitasnya tidak dipublikasikan. Untuk itu peneliti hanya akan memberikan hasil wawancara tanpa memberikan identitasnya. Pada umumnya mereka melakukan nikah siri setelah memiliki istri pertama,

³⁹ Wawancara dengan M. Syuaib Ambarita mahasiswa semester III program studi Bimbingan Konseling Universitas Negeri Medan, laki-laki, usia 19 tahun, wawancara dilakukan di Medan pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2010.

sehingga boleh dikatakan mereka ingin berpoligami secara rahasia, tanpa diketahui istrinya yang pertama.

Salah seorang informan⁴⁰ dari masyarakat kampus menyatakan bahwa mereka melakukan nikah siri karena menghindarkan dari perbuatan zina, selain itu juga agar tidak ribut dengan istrinya yang pertama, sebab bila diberitahu, akan terjadi percekcoakan dan pertikaian, sementara ia ingin menikah lagi. Mereka yang nikah siri ini memiliki kemampuan finansial yang memadai, artinya mereka tidak membuat istrinya yang peertama menderita soal keuangan atau ekonomi keluarga. Jadi, singkatnya, istrinya yang pertama tidak dikurangnya haknya dalam bidang keuangan, hanya saja soal waktu bertemu. Memang di sini terjadi pembohongan, jika pelaku nikah siri tersebut ingin menginap pada istri nikah sirinya itu, maka alasannya kepada istri pertamanya itu bisa banyak, terkadang karena tugas luar kota atau lainnya.

Selanjutnya, dari informan lainnya,⁴¹ menyatakan perilakunya seperti orang yang bermain petak umpet dengan istri pertamanya. Sebab, dia harus benar-benar menjaga, agar istri pertamanya tidak tahu bahwa ia telah memiliki istri dua. Selain

⁴⁰ Wawancara dengan informan yang tidak ingin disebutkan identitasnya di Medan pada hari Senin, tanggal 19 September 2010.

⁴¹ Wawancara dengan informan yang tidak ingin disebutkan identitasnya di Medan pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2010.

itu, perilakunya pun terkadang mendapat cemoohan dari lingkungannya di mana ia melakukan nikah siri. Sebab, masih ada pemahaman lingkungan tempat tinggalnya bahwa seolah-olah ia menyimpan gundik, perempuan murahan yang khusus untuk meladeni syahwat seksualnya semata. Berhadapan dengan masyarakat lingkungan seperti itulah perilaku nikah siri merasa tidak tentram dan tenang, seorang berbuat jahat dan maksiyat, padahal menurut keyakinannya bahwa nikah siri yang dilakukannya itu adalah sah menurut agama.

Selain itu, ada informan lainnya,⁴² yang melakukan nikah siri bukan karena poligami, tetapi karena masih status sama-sama mahasiswa mereka melakukannya agar terhindar dari perbuatan zina. Sebab, sudah saling mencintai, lalu belum punya kerja dan uang untuk melaksanakan pernikahan secara resmi, sehingga mereka nikah secara siri, dengan menjaga hubungan mereka untuk tidak mempunyai anak dulu, dengan bantuan alat-alat KB. Ketika ditanya, mereka lebih aman dan nyaman melakukannya selain memang sah menurut agama, tetapi yang penting terhindar dari perbuatan maksiyat.

⁴² Wawancara dengan informan yang tidak ingin disebutkan identitasnya di Medan pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2010.

Bila ditelusuri dari berbagai informan yang peneliti wawancarai, setidaknya ada beberapa alasan mengapa mereka melakukan nikah siri, yaitu :

- Karena lebih ringkas dan simple serta tidak berbelit-belit sehingga menghemat biaya. Hal ini jika pelakunya masih lajang dan perawan, biasanya malas berurusan secara administratif, atau karena alasan ekonomi.
- Ada persoalan yang akan muncul, jika seorang suami akan menikah lagi terhadap istrinya yang pertama.
- Takut diketahui atasannya atau istri sebelumnya..
- Karena tidak adanya restu dan persetujuan keluarga.
- Karena menghindarkan dari perbuatan zina.

Berkenaan dengan persoalan alasan seseorang melakukan nikah siri, jika dikorelasikan dengan hukum positif yang diatur dalam UU perkawinan No 1/1974 dan KHI. Bahwa ada perspektif yang negatif bagi seseorang yang akan melakukan nikah siri ini, sebab alasan untuk melakukan nikah siri ini dominan dilakukan oleh seseorang yang telah beristri atau laki-laki yang akan berpoligami. Sehingga nikah siri sebagai sebuah alternatif yang paling mudah, efisien dan ekonomis untuk

dilakukan di samping ada alasan lainnya, seperti takut diktehai istri sebelumnya atau takut diketahui atasannya sehingg aakan diberikan sanksi.

Dalam aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia tentang pernikahan, secara yuridis diatur di dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1988. Dalam kedua aturan hukum positif yang berlaku tersebut, hanya ada terminologi perkawinan/pernikahan saja, tidak ada sama sekali terminologi pernikahan siri. Terminologi nikah siri muncul setelah adanya UU No. 1/1974 tentang perkawinan berlaku secara efektif. Nikah siri pada dasarnya adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum. Nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam UU Perkawinan.

Dengan demikian, dapat dirumuskan,, bahwa nikah siri ialah nikah yang dilakukan tidak menurut ketentuan hukum positif. Nikah yang dilakukan tidak menurut hukum positif dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum.

Berkenaan dengan persoalan bagaimana status pernikahan siri dalam pespektif hukum positif. Semua informan menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak diakui secara

hukum. Secara faktual eksistensi dari pernikahan tersebut tidak diakui, karena memang tidak tercatat dan terdaftar sama sekali di KUA. Pernikahan ini juga, menurut para informan tidak memenuhi prosedur yang ada yaitu prosedur administratif.

Jawaban yang sama juga dinyatakan oleh para informan yang merupakan para pelaku nikah siri. Menurut mereka pernikahan yang mereka lakukan sebenarnya juga melanggar ketentuan hukum negara yang tidak diakui eksistensinya oleh negara. Jika merujuk dalam kedua aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sama sekali tidak dikenal ada terminologi pernikahan siri. Hal ini, karena nikah yang dimaksud oleh UU No. 1/1974 terdapat di dalam pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."⁴³

Bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan agamanya itu, sepanjang tidak bertentangan atau

⁴³ Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. II (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), h. 84.

tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.⁴⁴ Ketentuan yang kemudian diatur Undang-undang dalam pasal 2 ayat (2) menegaskan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Kemudian dikorelasikan dengan PP No. 9 tahun 1975 pasal 2 ayat (1) yang menerangkan “Pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32/1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.”⁴⁵

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut di atas, jelaslah pada dasarnya akan tampak terlihat bahwa pernikahan siri tersebut eksistensinya sama sekali tidak diakui oleh undang-undang atau hukum positif yang ada di Indonesia. Maka secara yuridis pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara, bahkan semua implikasi yang timbul di dalamnya ilegal. Adapun jawaban dari para informan penelitian ini sesungguhnya menyatakan hal yang sama.

Selanjutnya, berkaitan dengan beberapa alasan pelaku nikah siri, jika dikorelasikan dengan hukum positif yang ada di Indonesia khususnya berkenaan dengan perkawinan, yaitu UU Perkawinan No. 1/1974 dan KHI. Boleh dikatakan ada perspektif

⁴⁴Penjelasan atas UU Perkawinan No. 1/1974, lihat Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h.108.

⁴⁵*Ibid.* H. 84.

negatif bagi seseorang yang akan melakukan nikah siri ini, sebab alasan untuk melakukan nikahh siri ini dominan dilakukan oleh seseorang yang telah beristri atau laki-laki yang akan berpoligami. Dengan demikian, nikah siri sebagai sebuah alternatif yang paling mudah, efisien dan ekonomis untuk dilakukan di samping ada alasan lainnya, seperti takut diketahui istri sebelumnya atau takut diketahui atasannya sehingga akan diberi sanksi.

Dalam aturan hukum positif,⁴⁶ seperti yang diatur dalam KHI dinyatakan bahwa tentang beristri lebih satu orang pada pasal 56 ayat (1) dinyatakan "Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama". Selanjutnya pada ayat (3) dinyatakan "Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum."

Izin yang selanjutnya akan diberikan oleh Pengadilan juga harus memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam

⁴⁶Dalam UU Perkawinan No. 1/1974 diatur dalam pasal 4 dan 5, sedangkan dalam KHI diatur dalam pasal 55-59, pada kedua aturan hukum tersebut diberikan aturan prosedural yang rumit untuk melakukan izin berpoligami, sebab pada dasarnya KHI menganut prinsip monogami. Kendatipun secara yuridis KHI juga membolehkan untuk bagi laki-laki menikahi lebih dari satu orang, namun harus dilakukan dengan tata cara yang rumit. Lihat, Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. II (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), h. 84. Lihat juga, Ahmad rafi, *Hukum Islam di Indonesia*, cet.. IV (Jakarta : Rajawali Pers, 2000), h. 171-173.

pasal 57 bahwa “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri leboh dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴⁷

Kemudian juga dipertegas dengan pasal 58, “ Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang no. 1/1974, yaitu:

- a. Adanya persetujuan istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.⁴⁸

Jika karena faktor ingin melakukan poligami secara diam-diam inilah yang kemudian pasangan nikah siri ini tidak mau mencatatkan pernikahannya tersebut, karena ketakutan diketahui oleh istri sebelumnya atau atasannya.

Berdasarkan dari hasil wawancara para pelaku nikah siri yang tidak ingin disebutkan identitasnya, pada umumnya, pikiran mereka selalu dibayang-bayangi oleh istri pertama mereka, kalau-kalau suatu waktu ia tahu bahwa suaminya memiliki istri

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid.*

lain selain dia. Tentunya, akan terjadi disharmoni dan konflik. Inilah bayangan umumnya orang yang melakukan nikah siri, sehingga boleh dikatakan kurang ketenangan dan ketentraman batin. Selain, padangan masyarakat lingkungannya yang kurang bersahabat. Namun, untuk lingkungan di masyarakat kampus mereka tidak masalah. Sebab, masyarakat kampus bisa memahami berbagai latar belakang dari orang yang melakukan nikah siri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab terdahulu maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan masyarakat kampus di kota Medan tentang nikah siri pada umumnya menyatakan bahwa nikah siri itu adalah nikah secara diam-diam tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama di tempat di mana nikah siri itu dilaksanakan. Namun, nikah tersebut memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan secara agama Islam.
- b. Sikap masyarakat kampus di kota Medan tentang nikah siri terbagi dua, pertama menganggap positif, dalam arti kata tidak mempermasalahkannya karena syah menurut agama Islam, hanya saja tidak tercatat dalam administrasi negara, *kedua*, mereka yang memandang negatif, dalam arti kata, pandangan mereka terhadap nikah siri itu lebih banyak membawa mudarat ketimbang maslahatnya, terutama banyak merugikan kaum perempuan serta anak yang dilahirkan melalui nikah siri, mereka tidak memiliki hak menuntut manakala terjadi perceraian, sebab mereka

tidak tercatat dalam administrasi negara, sehingga mereka dianggap tidak pernah menikah.

- c. Perilaku masyarakat kampus tentang nikah siri, pada umumnya tidak tenang, sebab terus dibayang-bayangi oleh istri pertamanya. Takut, kalau suatu waktu diketahui oleh istrinya, sehingga akan terjadi masalah seperti; disharmoni dalam rumah tangga.

B. Saran-Saran dan Rekomendasi

- a. Bagi mereka yang berkeinginan untuk melakukan nikah siri, perlu mempertimbangkan kembali maslahat dan mudaratnya. Oleh karena, pada umumnya orang yang nikah siri itu membawa dampak negatif dalam kehidupannya, maka disarankan untuk tidak melakukan nikah siri. Kalau ingin juga melakukan pernikahan, lebih baik nikah secara formal, yakni dicatat di depan Pegawai Pencatat Nikah KUA di mana pernikahan dilaksanakan.
- b. Disarankan kepada masyarakat agar tidak melakukan nikah siri, tetapi menikah secara formal, yakni mencatatkannya di KUA setempat.
- c. Bagi mereka yang sudah menikah siri agar mencatatkannya ke KUA, agar status istri dan anak-

anaknya memiliki kekuatan hukum positif, manakala terjadi perceraian.

- d. Direkomendasikan kepada Pemerintah untuk membuat aturan yang jelas terhadap mereka yang melakukan nikah siri, tujuannya untuk melindungi kaum perempuan sehingga memiliki status yang jelas di mata hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sebab, nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum positif di Indonesia, sehingga bagi kaum perempuan dan anak-nak dari hasil pernikahan siri, bila terjadi perceraian tidak memiliki hak warisan atau hak lainnya, karena dianggap oleh negara tidak pernah menikah.
- e. Merekomendasikan kepada pemerintah agar lebih intensif menosialisasikan pemahaman tentang nikah siri ini kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Bibliografi

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : PT. Ikhtiar Van Hoeve, 1999.
- Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*. Beirut : Dar al-Fikr, tt.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, edisi kedua. Surabaya : Pustaka Pogressif, 1997.
- A.Gani Abdullah, Moh. Daud Ali dalam *Mimbar Hukum Islam*, No. 28 tahun VII 1996, September-Oktober.
- Ali al-'Adawi, *Hasyiyah al-Kurasy 'ala al-Mukhtasar Said Khalil*, Juz II, (Beirut : Dar Sadir, t.t.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Logos Waca Ilmu, 1997.
- Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarif al-Nawawi al-Dimasqi, *Raudah al-Talidin*. Beirut-Lebanon: dar al-kitab al-'Ilmiah, t.t.
- Imam Malilk, *Al-Muwatta'*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt.
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terpadu*. Yogyakarta : Gajah Mada Universiti Press, 1996.
- Haliman, *Hukuman Pidana Syariat Islam*, Jakarta : Bulan Bintang , 1971.
- Ibn Qudamah, *al-Mughni li Ibn al-Qudamahh*, juz IX, Riyad : Dar 'Alam al-Kutub, 1997.

- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II, Jakarta : Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.
- Irawan Soejitno, *Teknik Membuat Undang-undang*. Jakarta : Pradinya Paramita, 1976.
- Jailh Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta : Rosda Karya, 2000.
- Jhon M.Echol, *Kamus Inggris—Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia, 1989.
- Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Humaniora Press, 1991.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 1999.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali*. Bandung : Hidakarya Agung, 1983.
- M.Arskal Salim, GP, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibn Taimiyah*. Jakarta : Logos, 1998.
- Masjfuk Zuhdi, *Nikah Sirri, Nikah di Bawah tangan, dan Status Anaknyanya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, dalam *Mimbar Hukkum Islam* no. 28 tahun VII 1996.
- Muhammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1995.
- Muhammad al-Zuhri al-Ghamarawi, *al-Sirraj al-Wahhaj*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1991)

Robert C. Bogdan & Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research fo Education: An Introduction to Theory and Metdods*. Boston : Allyn and Bacon, Inc, 1982.

S.Widiastuty, *Grand Kamus*. Surabaya : Apollo, tt.

Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fath al-Muin*, terjemahan, Ali As'ad. Surabaya ; menara Kudus, 1979.

Yahya Harahap, *Informasi Materi KHI: Mempesotifkan Abstraksi Hukum Islam*, dalam buku, KHI dan PA dalam *Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Logos, 1999.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz VII, Beirut : Dar al-Fikr, 1998.

Wannimag Hasbul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*. Jakarta : Golden Terayon Press, 1994.

Wildan Suyuti Mustofa, "Nikah Sirri (*Antara Kenyataan dan Kepastian Hukum*)," dalam *Mimbar Hukum*, vol. 28.